



**SEKRETARIAT**

**TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia**

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-3912812

Faks : 021-3912-511 dan 021-391-2513

E-Mail : sekretariat@tnp2k.go.id

Website : [www.wapresri.go.id](http://www.wapresri.go.id)



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI BANTEN**



TNP2K

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN





SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI BANTEN**



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**Judul: Indikator Kesejahteraan Daerah  
Provinsi Banten**

Disusun dan Diterbitkan oleh:  
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Cetakan Pertama, November 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.  
© 2011 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)  
Foto Cover: panoramio.com, yanfreski.blogspot.com

Korespondensi : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia  
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110  
Telp. 021-3912812  
Fax. 021-3912-511 dan 021-391-2513  
E-mail: sekretariat@tnp2k.go.id  
Website: www.wapresri.go.id



## DAFTAR SINGKATAN

ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AKB	: Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
APK	: Angka Partispasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
CFSI	: <i>Composite Food Security Index</i>
DKP	: Dewan Ketahanan Pangan
FIA	: <i>Food Insecurity Atlas</i>
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
HDI	: <i>Human Development Index</i>
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
NTP	: Nilai Tukar Petani
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SAKERNAS	: Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
WFP	: <i>World Food Programme</i>



## DAFTAR ISI

Daftar Singkatan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar.....	vi
Pertumbuhan Ekonomi.....	1
Inflasi.....	4
Nilai Tukar Petani.....	5
Tingkat Kemiskinan .....	6
Indikator Kemiskinan .....	7
Program Penanggulangan Kemiskinan .....	8
Tingkat Pengangguran dan Ketenagakerjaan.....	9
Bidang Kesehatan .....	11
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.....	15
Bidang Pendidikan.....	17
Akses Terhadap Air Bersih .....	19
Akses Terhadap Sanitasi.....	20
Indeks Pembangunan Manusia.....	21
Komponen Indeks Pembangunan Manusia .....	22
Ketahanan Pangan.....	23
Prioritas Bidang Pendidikan .....	26
Prioritas Bidang Kesehatan.....	29
Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar .....	31
Prioritas Bidang Ketenagakerjaan .....	34
Bidang-Bidang Prioritas Kesejahteraan Rakyat .....	35
PNPM Mandiri.....	36
Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	38
Anggaran Pembangunan Daerah .....	41





## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 – 2009
- Tabel 2. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008-2010 (Jiwa)
- Tabel 3. Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2008-2009 (Persen)
- Tabel 4. Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010
- Tabel 5. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010
- Tabel 6. Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 7. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 8. Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 9. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2008 dan 2009
- Tabel 10. Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 11. Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota
- Tabel 12. Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011



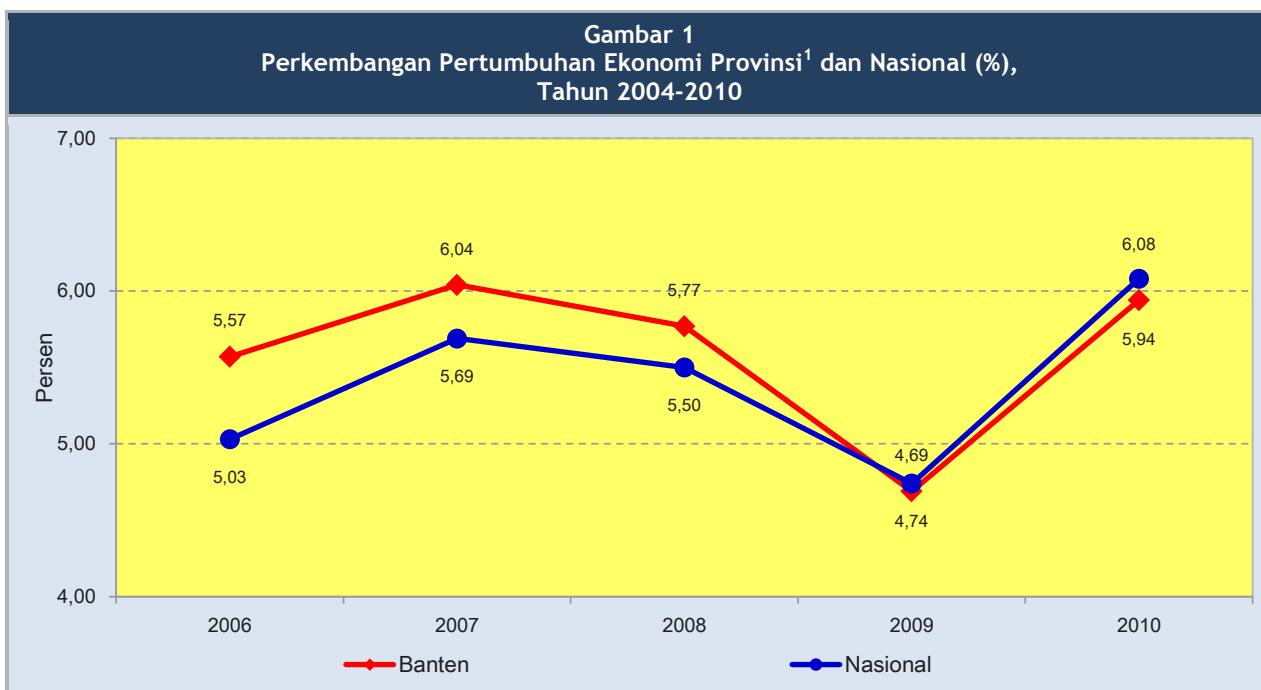
## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional (%), Tahun 2006-2010
- Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 3. Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Buruh/Karyawan/Pegawai Sebulan Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 4. Perkembangan Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Provinsi Banten (%), Tahun 2010-2011
- Gambar 5. Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Menurut 66 Kota Besar di Masing-masing Provinsi (%), (Bulan Juli 2011)
- Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani (Year-on-Year) Provinsi Banten, Tahun 2008-2011
- Gambar 7. Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi (%), Bulan Juli 2011
- Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 9. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 10. Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010 dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota
- Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 13. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 14. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007
- Gambar 15. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi (Jawa), Tahun 2009
- Gambar 16. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Jawa), Tahun 2009
- Gambar 17. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 18. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 19. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2009
- Gambar 20. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 21. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 22. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 23. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 24. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 25. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009

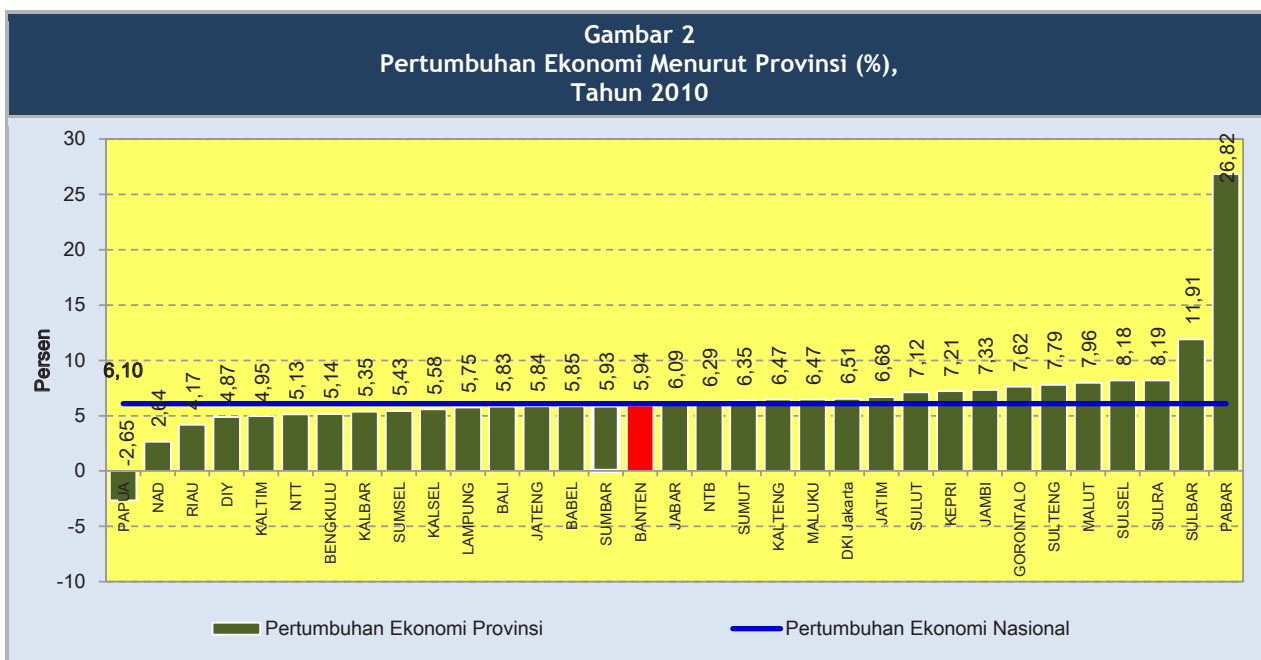
- Gambar 26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 28. Konsumsi Normatif terhadap Produksi Bersih Sereal per Kapita Menurut Kabupaten/ Kota, Tahun 2009
- Gambar 29. Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 30. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun
- Gambar 31. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)
- Gambar 32. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama
- Gambar 33. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Kematian Bayi
- Gambar 34. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi
- Gambar 35. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih
- Gambar 36. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Sanitasi
- Gambar 37. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Listrik
- Gambar 38. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja
- Gambar 39. Komposisi BLM PNPM Mandiri Provinsi Banten, Tahun 2011
- Gambar 40. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR di Provinsi Banten, 2010 - 2011
- Gambar 41. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR Nasional, 2010 - 2011
- Gambar 42. Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Terserap Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 43. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 44. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Bank Penyalur (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 45. Komposisi Kredit yang Terserap Menurut Bank Penyalur Provinsi Banten (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 46. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi, Provinsi Banten (Juta Rupiah), Tahun 2010
- Gambar 47. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, Tahun 2010



# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 merupakan angka sementara dan tahun 2010 merupakan angka sangat sementara.

## PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 1.

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 - 2009

LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)		PDRB Atas Dasar Harga Konstan ADHK 2000 (Triliun Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000 (Persen)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Pertanian	10,26	11,21	5,41	5,64	3,18	4,31
Pertambangan Dan Penggalian	0,14	0,17	0,08	0,09	14,23	13,95
Industri Pengolahan	55,43	57,44	32,23	32,71	2,31	1,50
Listrik, Gas & Air Bersih	4,96	5,27	2,81	2,92	6,70	4,16
Bangunan	3,99	4,66	2,01	2,20	6,92	9,66
Perdagangan, Hotel & Restoran	24,62	27,66	14,20	15,13	10,95	6,51
Pengangkutan & Komunikasi	11,39	13,25	6,20	6,88	7,27	10,91
Kuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,69	5,46	2,49	2,82	16,45	13,36
Jasa - Jasa	7,01	7,93	3,38	3,64	12,33	7,59
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>122,49</b>	<b>133,05</b>	<b>68,80</b>	<b>72,03</b>	<b>5,77</b>	<b>4,69</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Tabel 2.

Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008-2010 (Jiwa)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2009	2010	2010
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian	813.003	776.419	745.268	717.535	722.662
Industri Pengolahan	705.831	798.998	843.718	863.269	1.053.922
Bangunan	170.628	158.994	162.550	153.951	227.432
Perdagangan, Hotel & Restoran	979.925	1.021.531	969.287	984.513	1.189.714
Pengangkutan & Komunikasi	348.296	350.603	327.001	354.674	385.304
Kuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	613.795	645.874	614.479	707.542	958.732
Lainnya	37.507	40.406	41.935	33.231	45.319
<b>Jumlah</b>	<b>3.668.985</b>	<b>3.792.825</b>	<b>3.704.238</b>	<b>3.814.715</b>	<b>4.583.085</b>

\*) Pertambangan, Listrik Air Bersih dan Jasa-jasa

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

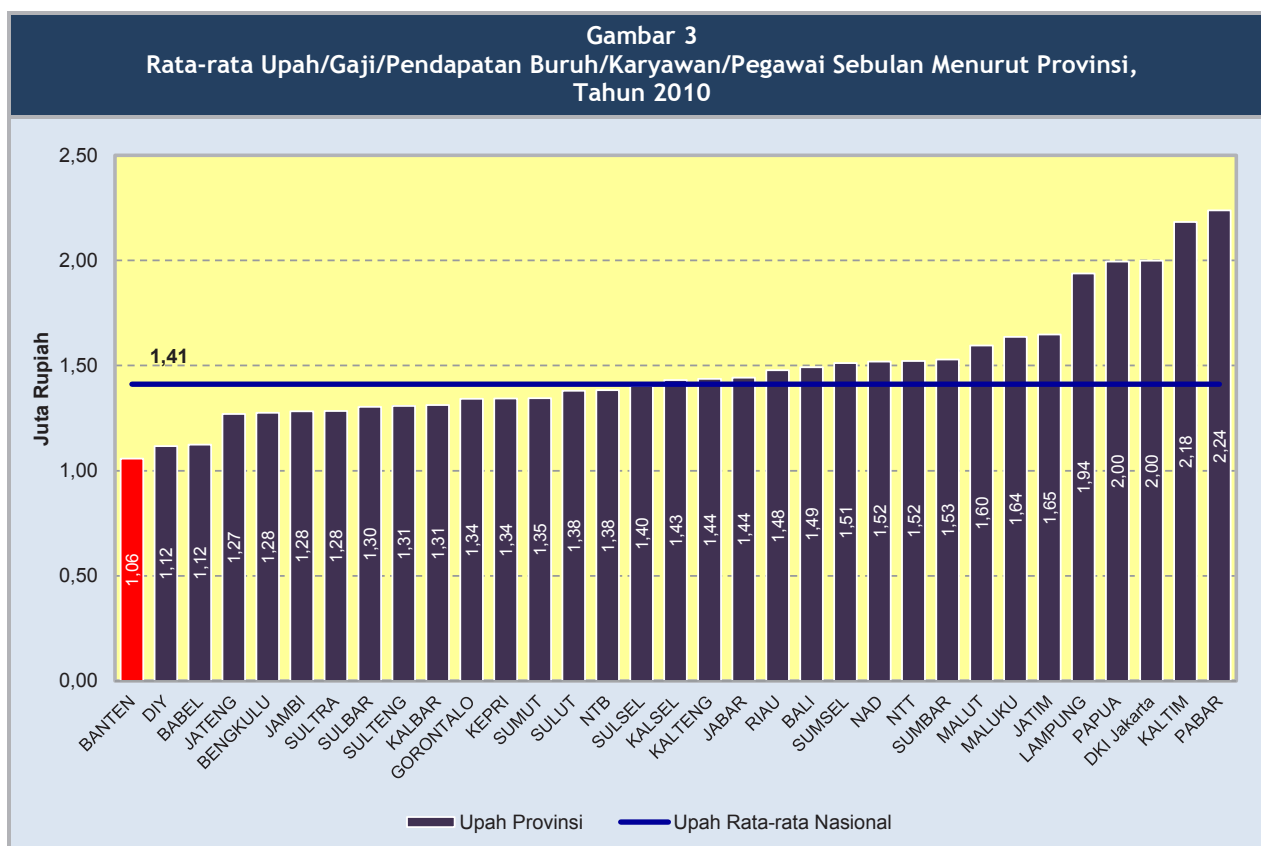
# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 3.  
Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2008-2009(Persen)

LAPANGAN USAHA	Distribusi PDRB (ADHK 2000)		Distribusi Tenaga Kerja	
	2008	2009	2008	2009
Pertanian	7,86	7,83	22,16	20,12
Industri Pengolahan	46,84	45,41	19,24	22,78
Bangunan	2,92	3,06	4,65	4,39
Perdagangan. Hotel & Restoran	20,64	21,00	26,71	26,17
Pengangkutan & Komunikasi	9,01	9,55	9,49	8,83
Keuangan. Persewaan & Jasa Perusahaan	3,62	3,92	16,73	16,59
Lainnya*	4,91	5,05	1,02	1,13

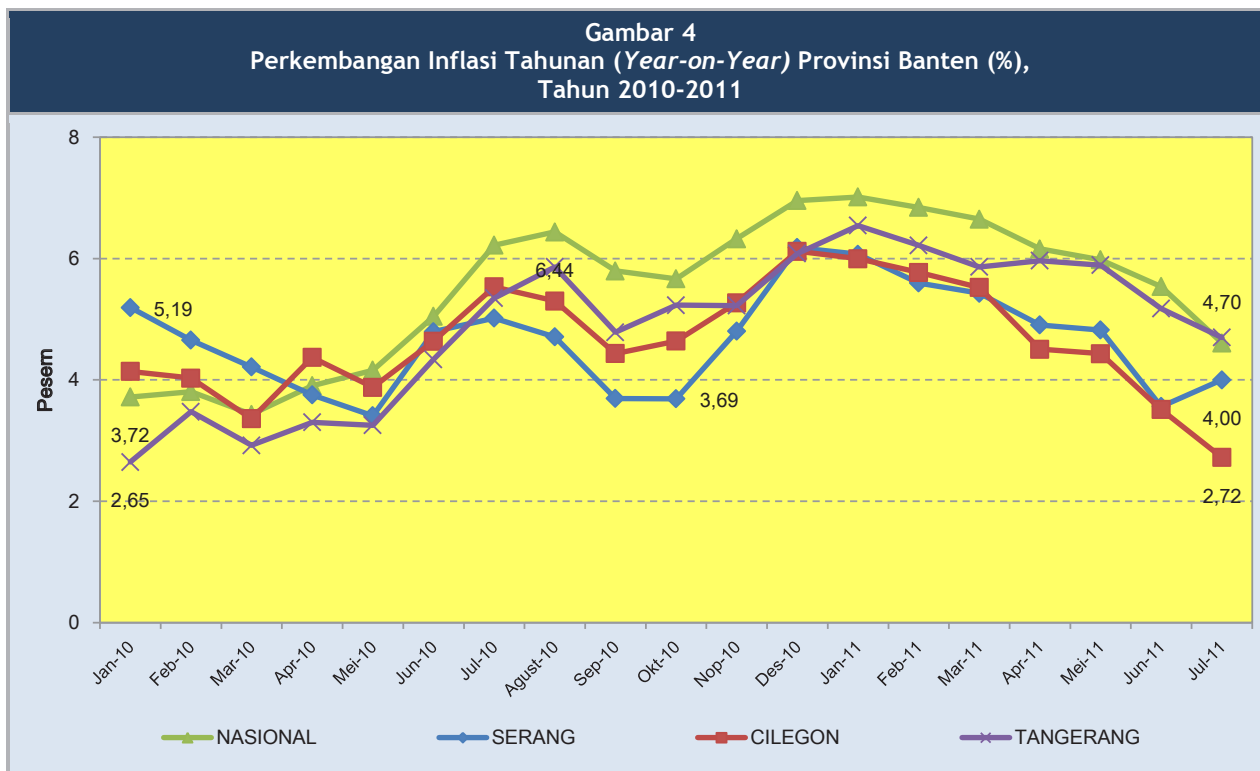
\*) Pertambangan, Listrik Air Bersih dan Jasa-jasa

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

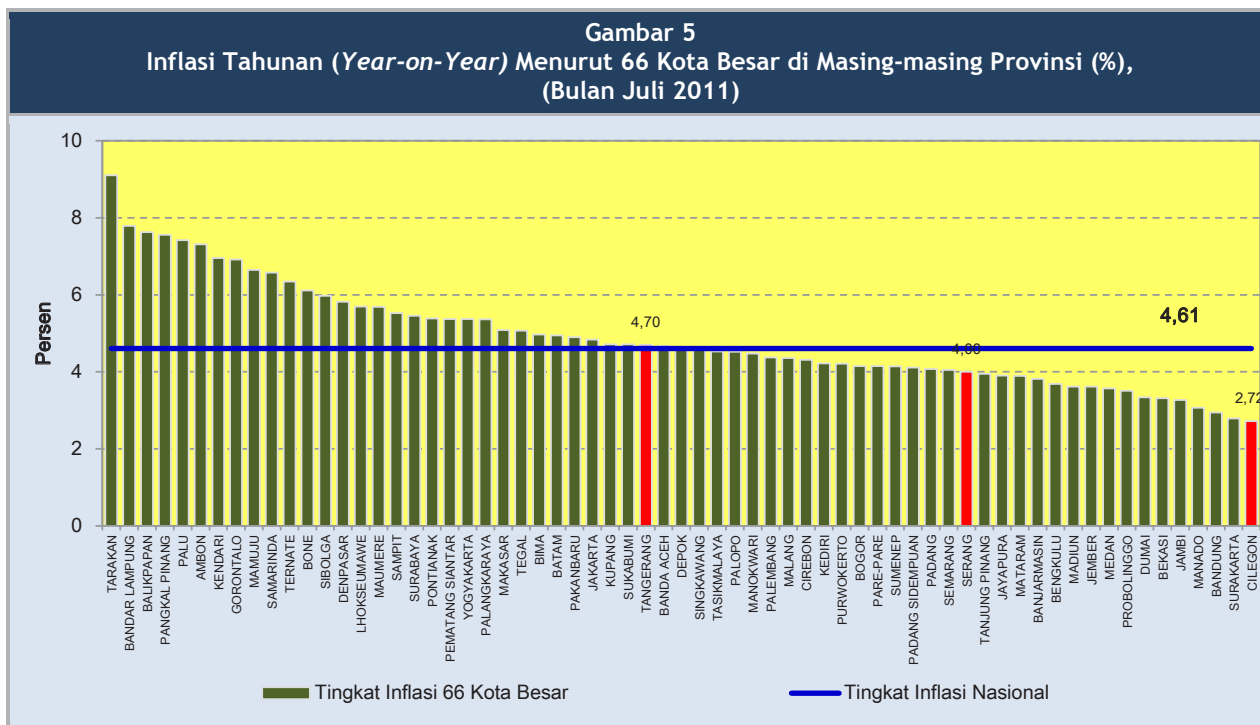


Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS 2011

# INFLASI



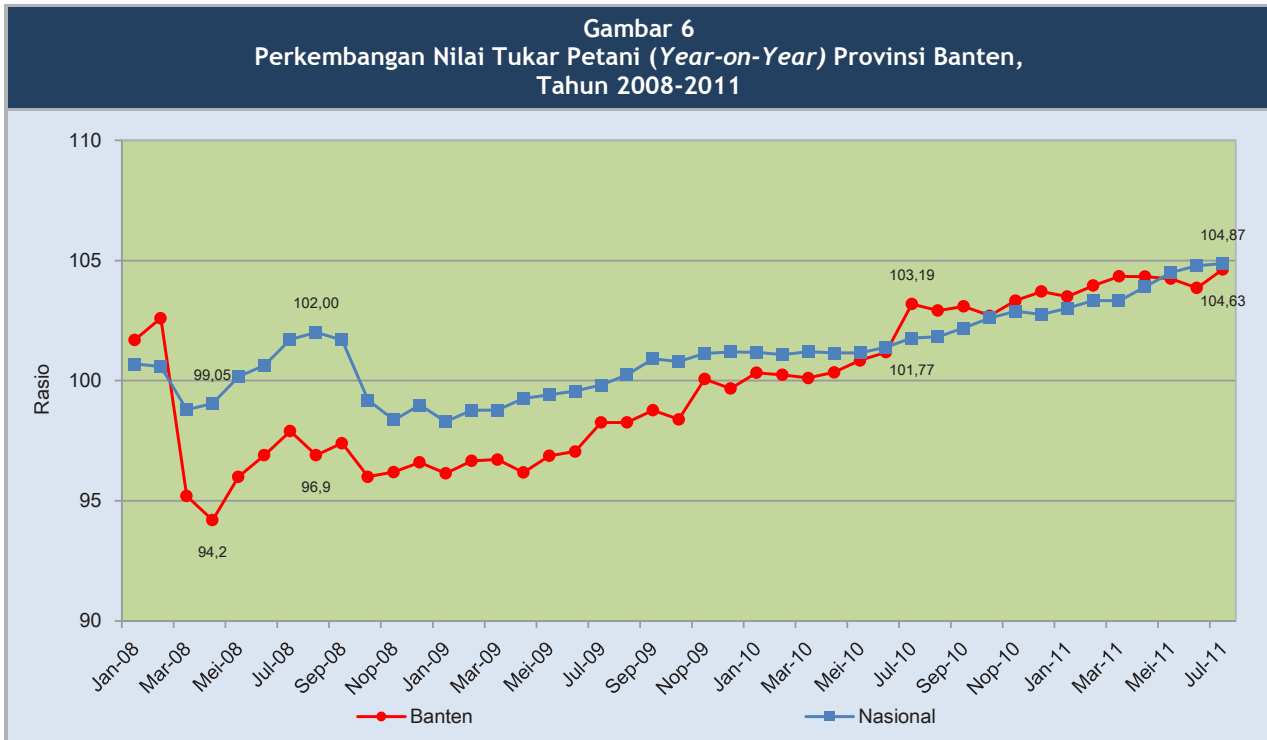
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



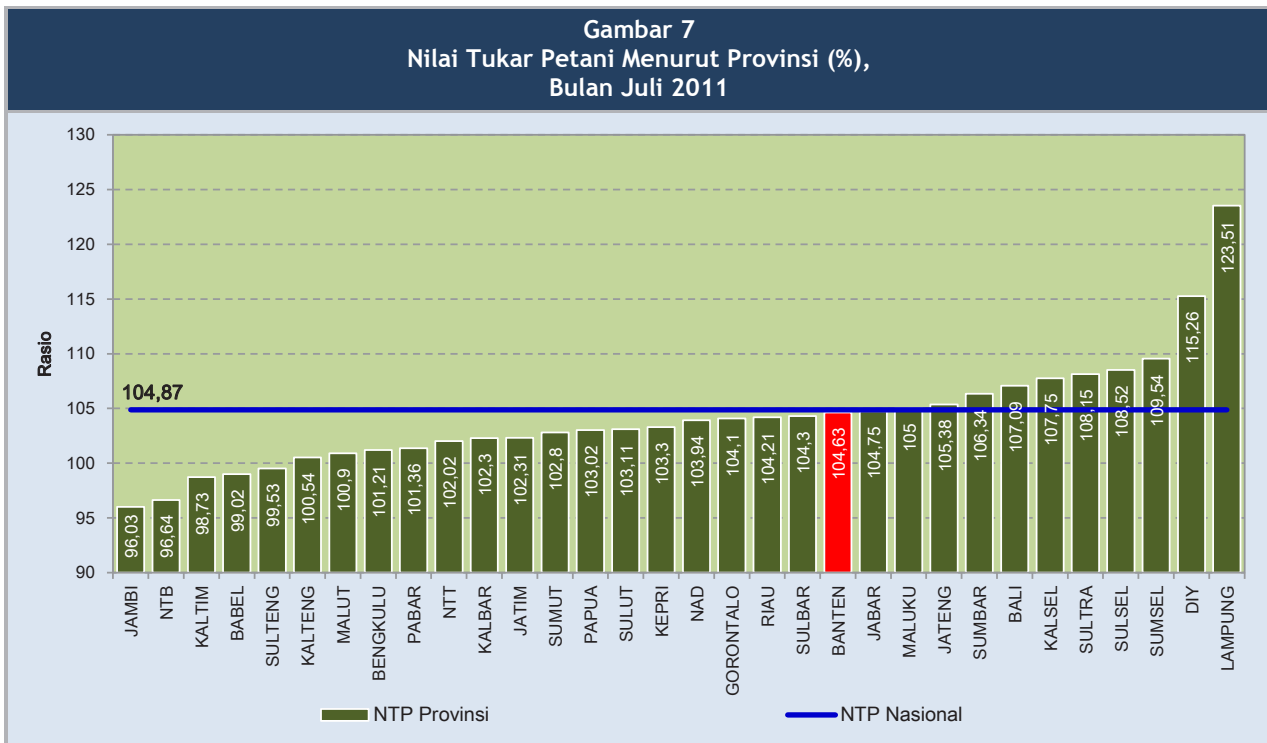
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



# NILAI TUKAR PETANI

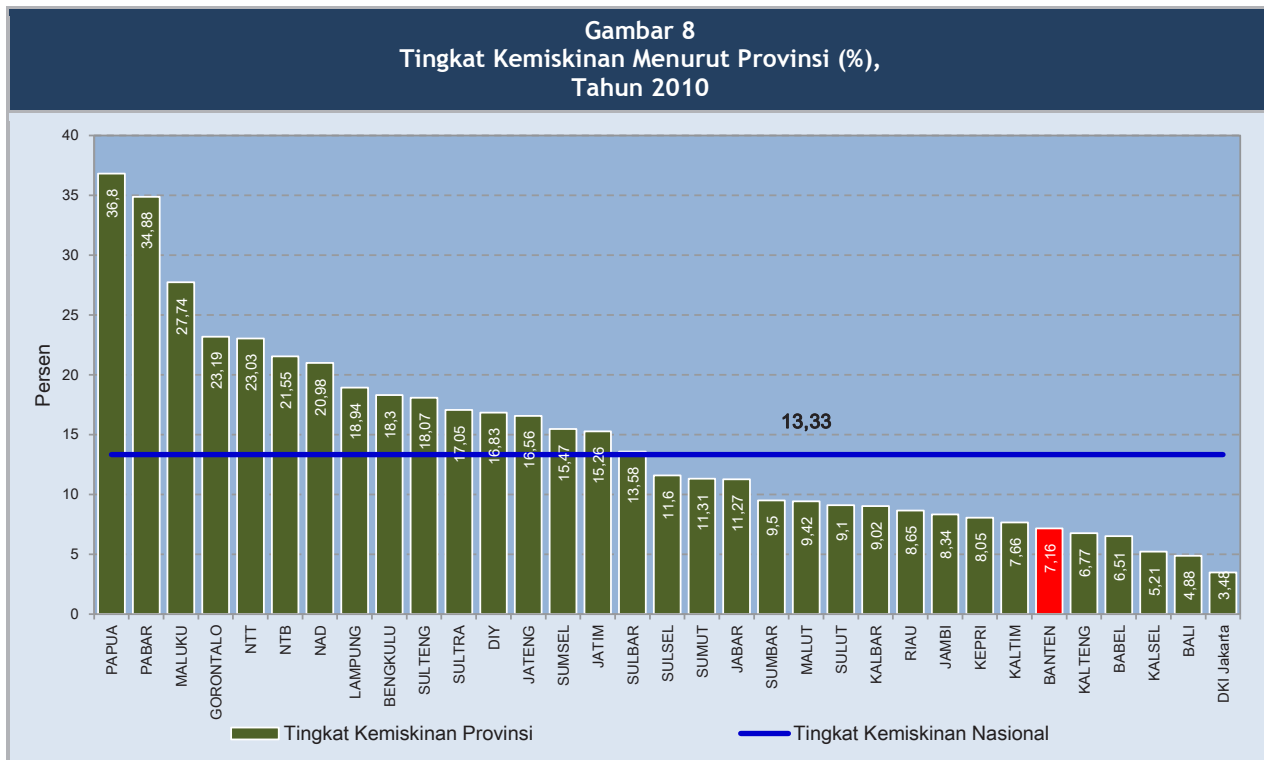


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

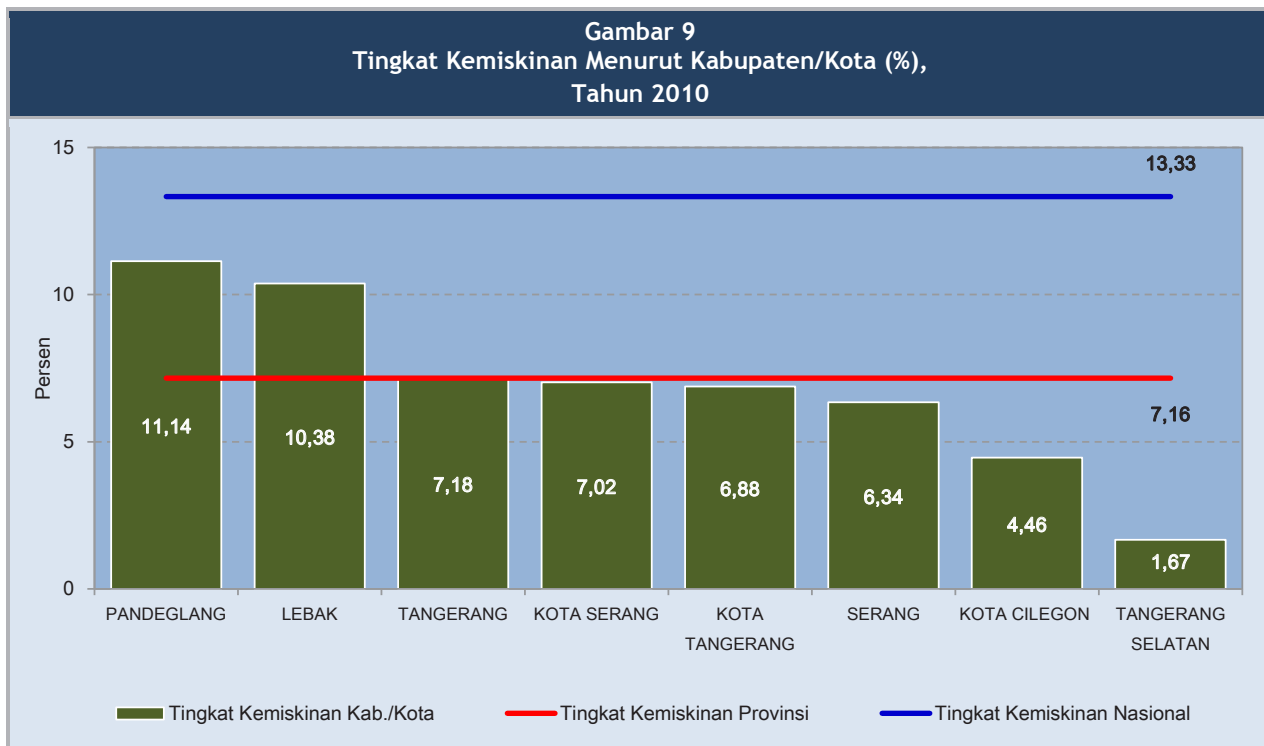


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

# TINGKAT KEMISKINAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

## INDIKATOR KEMISKINAN

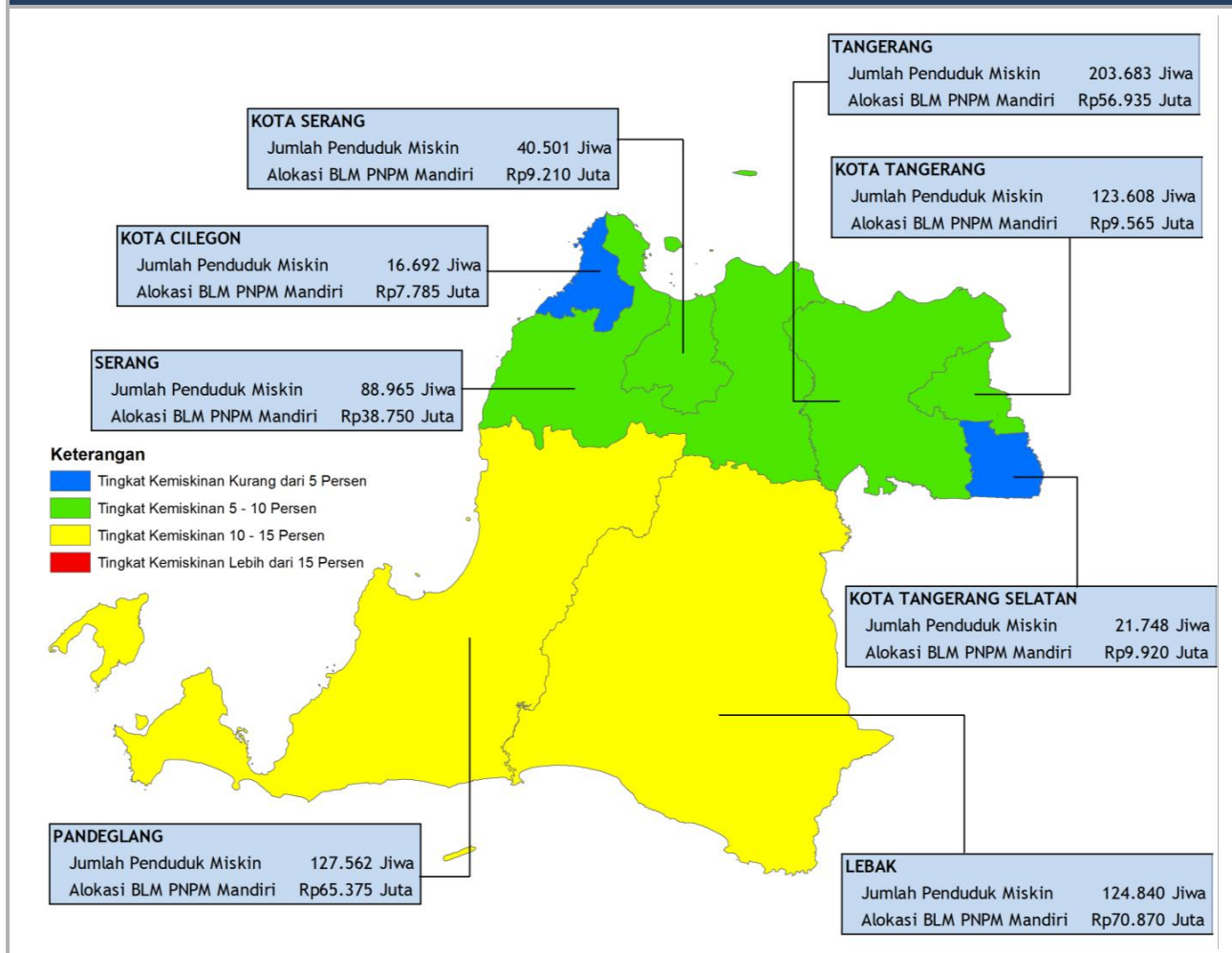
Tabel 4.  
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Presentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
PANDEGLANG	190 256	202 483	12,01	11,14	140 281	127 562
LEBAK	174 367	185 573	10,63	10,38	142 229	124 840
TANGERANG	241 607	258 155	6,55	7,18	256 151	203 683
SERANG	180 526	192 128	5,80	6,34	82 897	88 965
KOTA TANGERANG	284 093	303 551	6,42	6,88	106 102	123 608
KOTA CILEGON	230 354	246 662	4,14	4,46	15 367	16 692
KOTA SERANG	185 597	197 525	6,19	7,02	32 764	40 501
TANGERANG SELATAN		275 643		1,67		21 748
BANTEN	198 750	208 023	7,64	7,16	775 791	747 598
INDONESIA	200 262	211 726	14,15	13,33	32.530.000	31.023.390

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

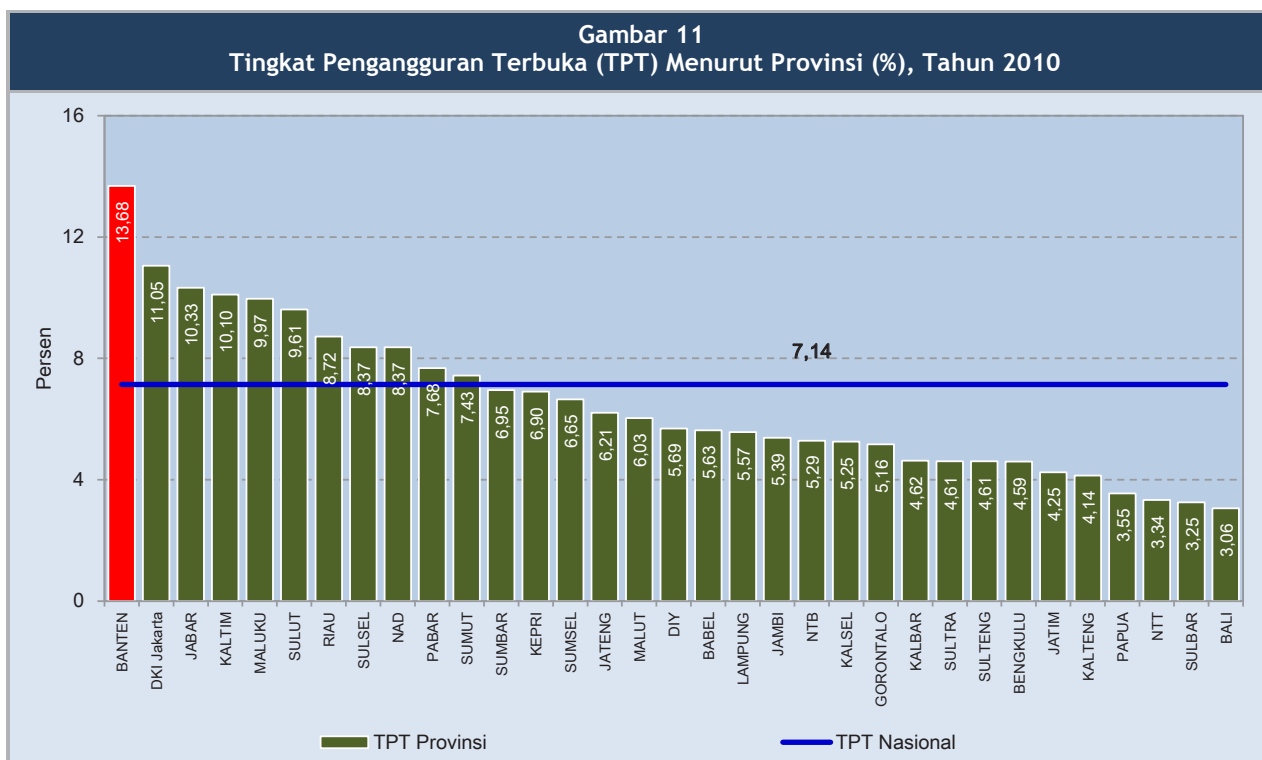
# PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Gambar 10  
Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010,  
Alokasi BLM PNPB Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota

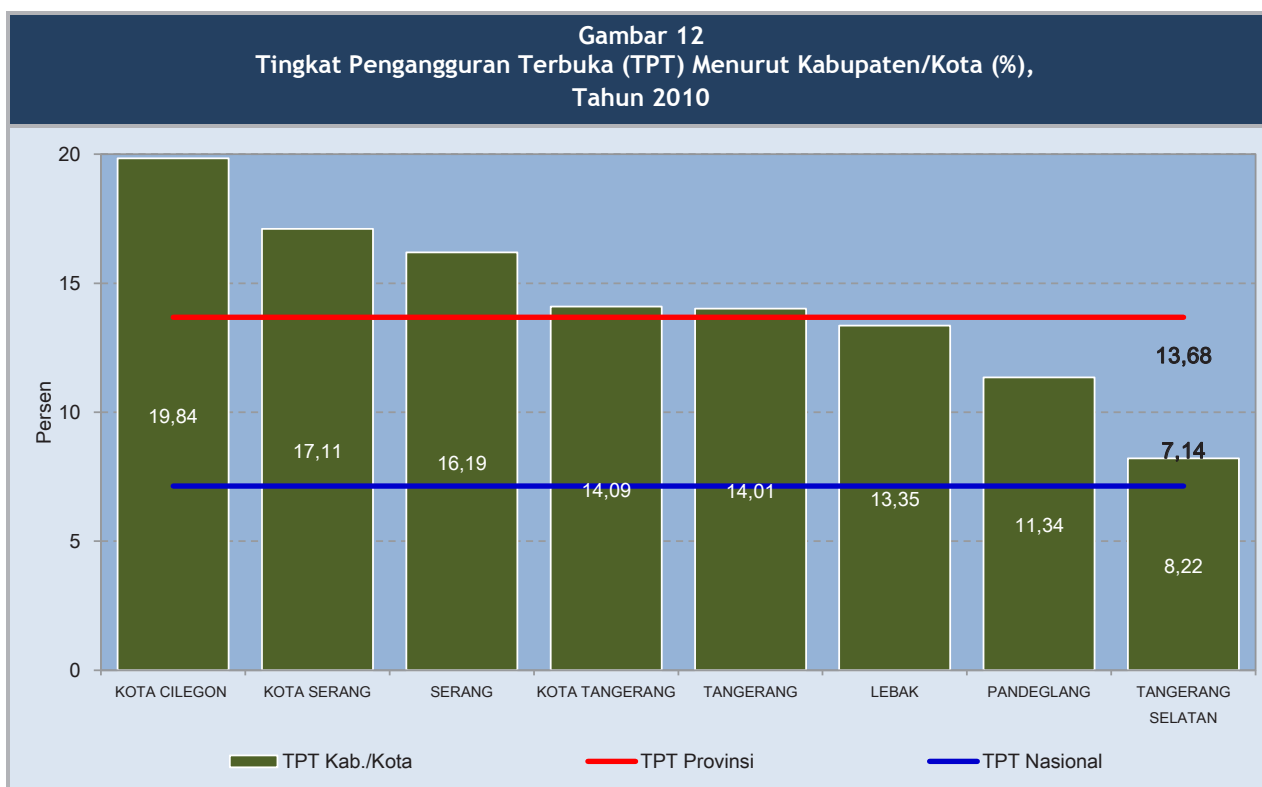


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011  
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011

# TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

## TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN

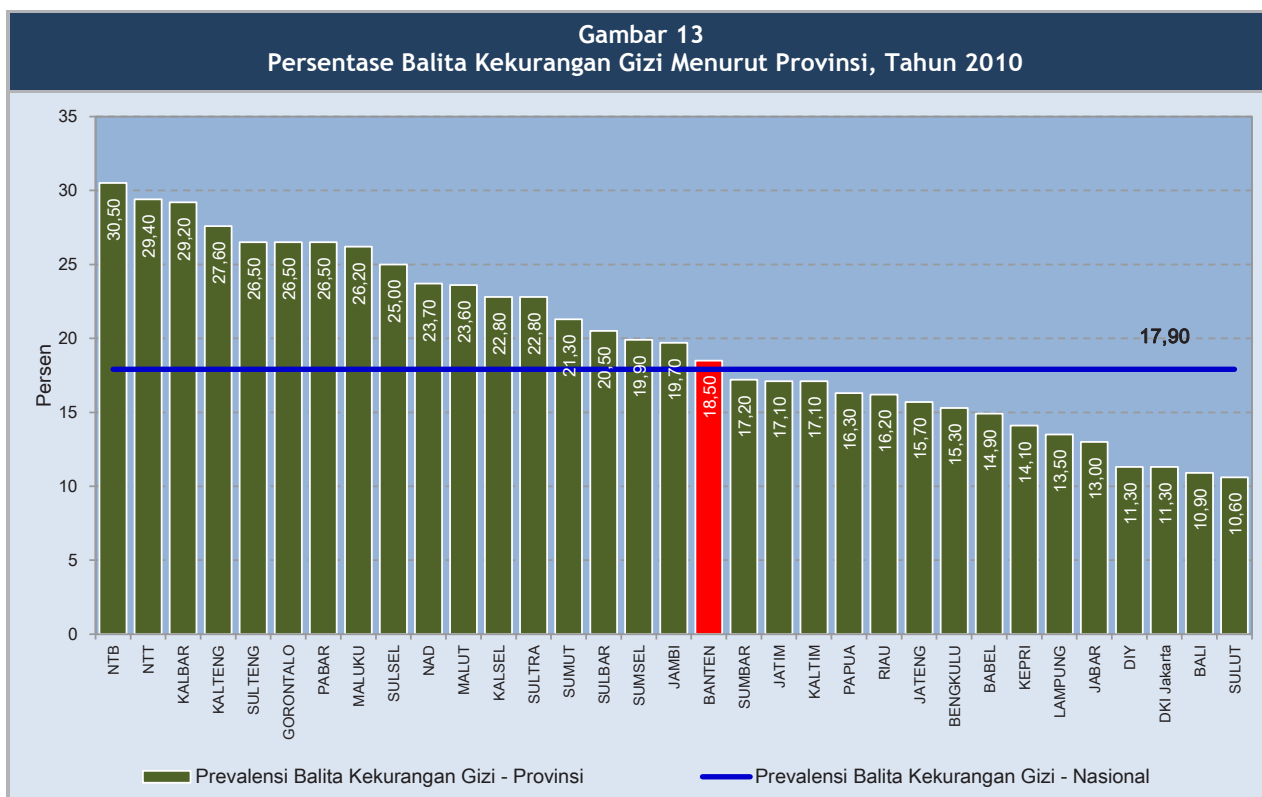
Tabel 5.  
Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010

Daerah	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 14 Jam Seminggu		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 35 Jam Seminggu		Pekerja di Sektor Informal	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
PANDEGLANG	63,52	63,76	5,27	3,18	32,25	37,57	77,08	76,76
LEBAK	67,69	63,76	4,26	4,42	28,63	43,82	79,83	76,13
TANGERANG	62,12	65,90	1,91	1,24	12,12	12,00	34,22	36,52
SERANG	60,78	65,68	3,01	4,29	22,06	29,87	55,92	55,73
KOTA TANGERANG	68,51	69,17	1,92	1,19	9,80	8,69	25,13	24,84
KOTA CILEGON	60,09	65,60	1,87	0,75	12,83	12,64	40,59	35,89
KOTA SERANG	60,51	67,64	2,70	2,55	16,89	18,94	54,23	41,83
TANGERANG SELATAN		60,00		1,12		9,59		25,35
BANTEN	63,74	65,34	2,76	2,19	17,48	19,79	46,86	44,08
NASIONAL	67,23	67,72	4,29	4,11	30,10	30,75	61,56	58,96

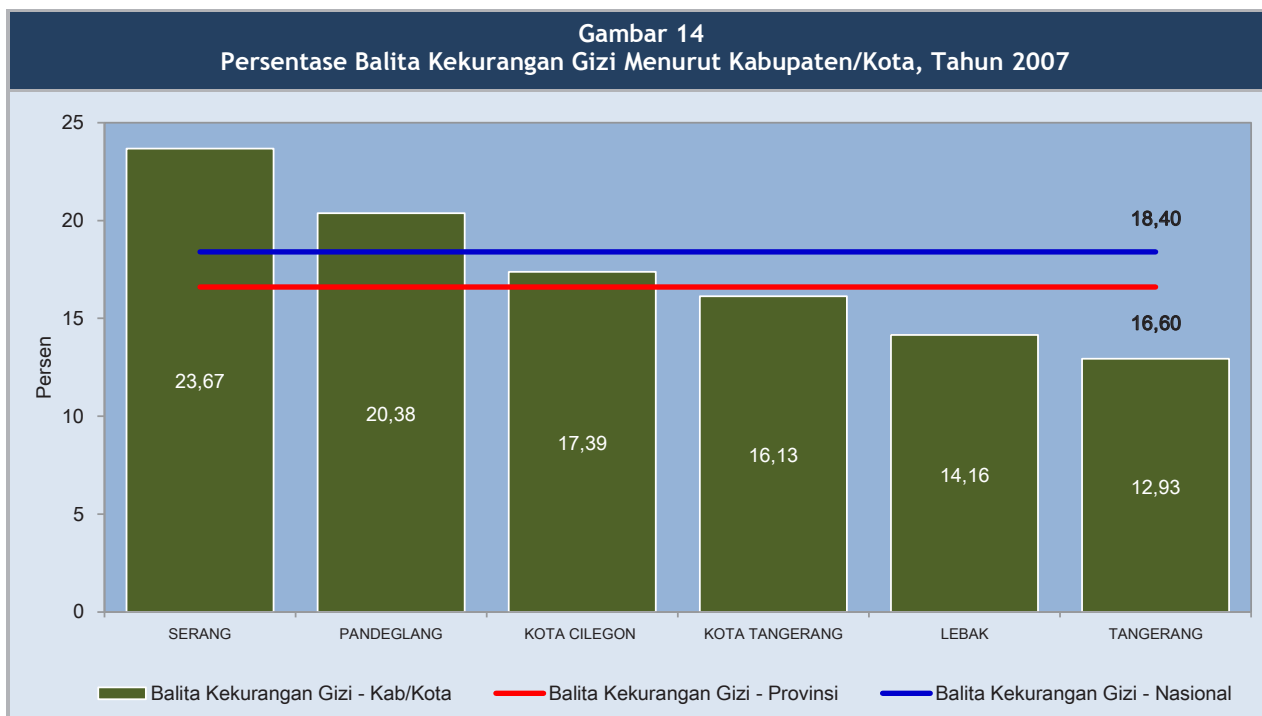
Keterangan: Daerah Pemekaran, Data Belum Tersedia.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

## BIDANG KESEHATAN

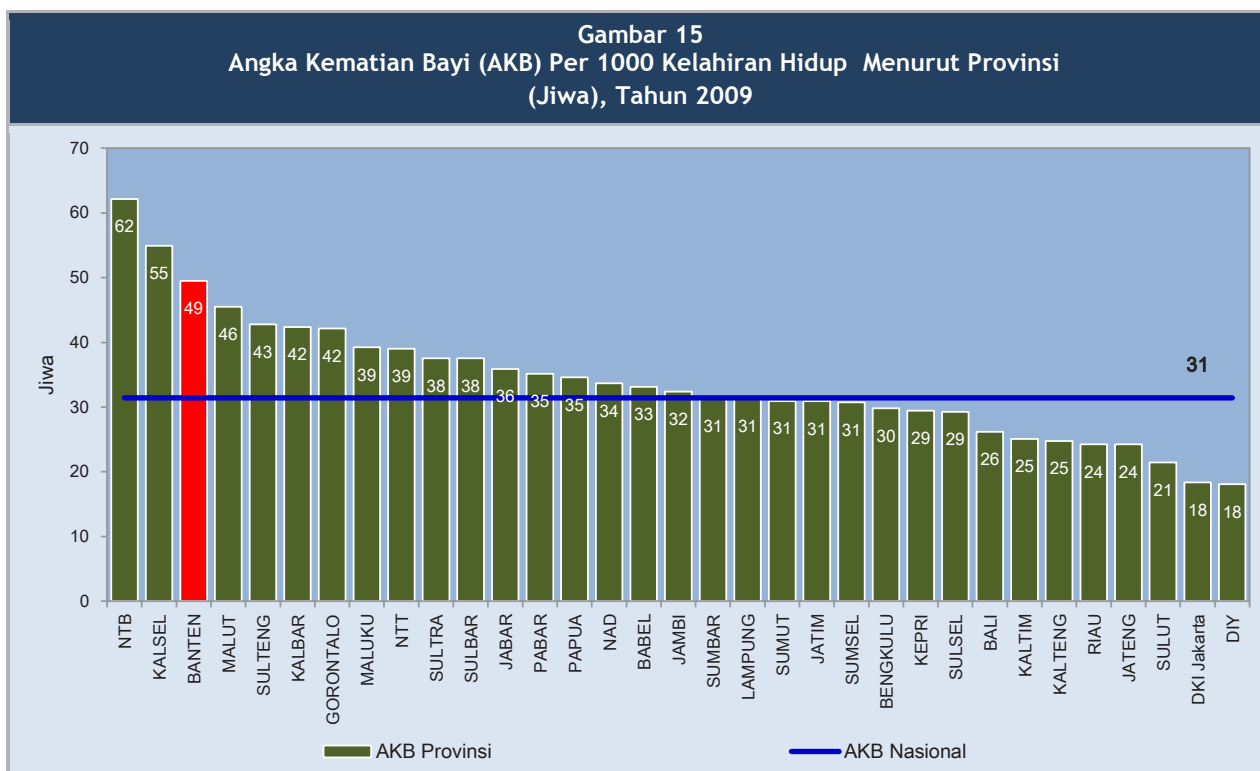


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2010

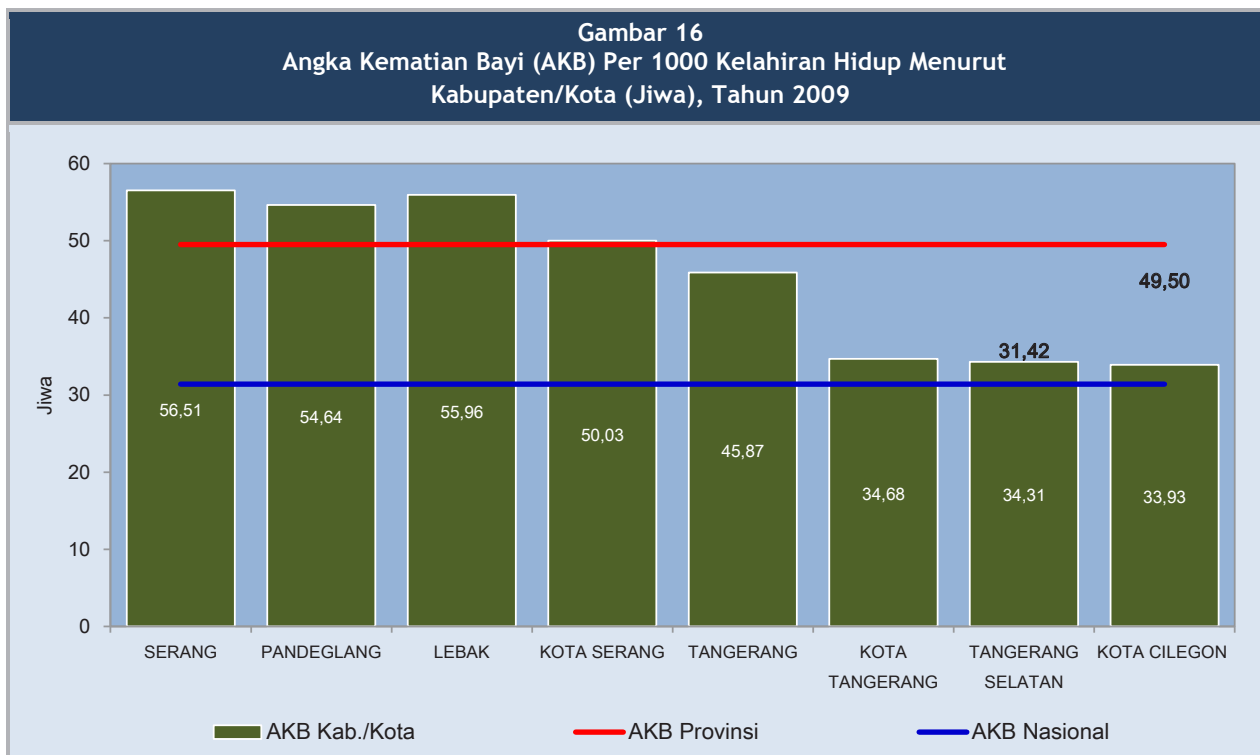


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2007

## BIDANG KESEHATAN



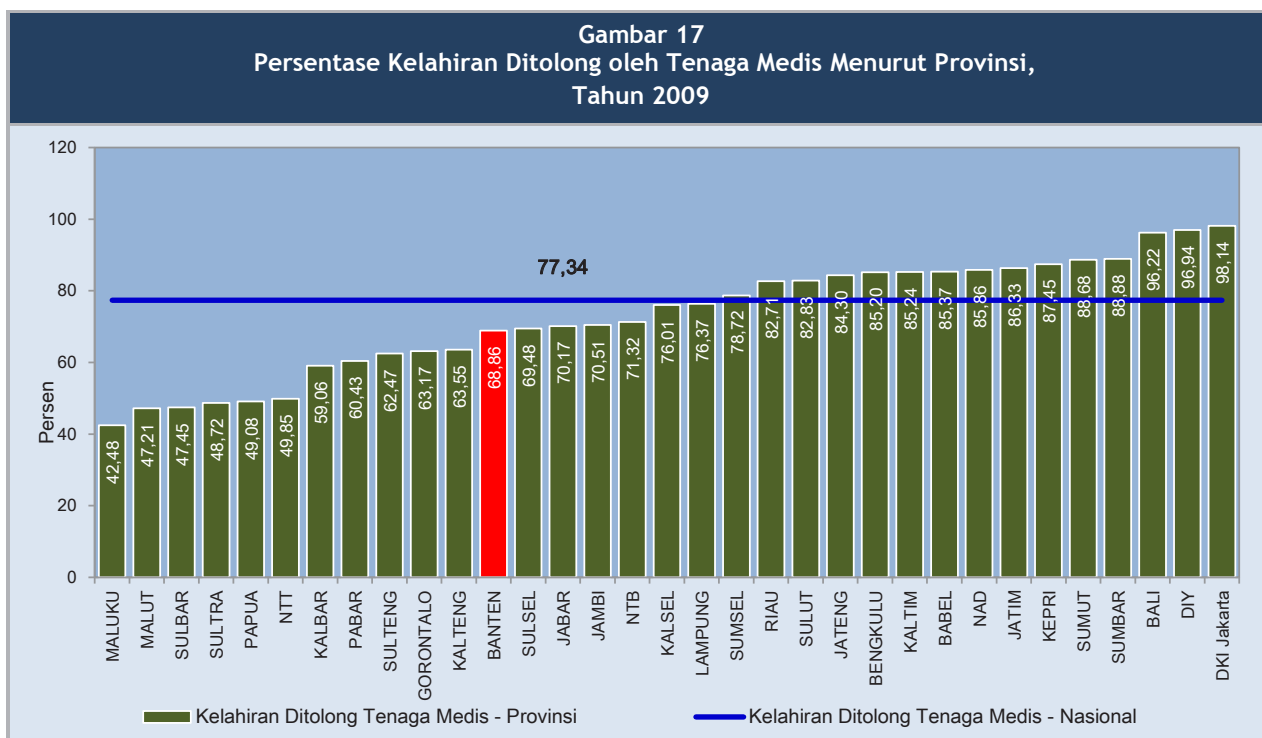
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



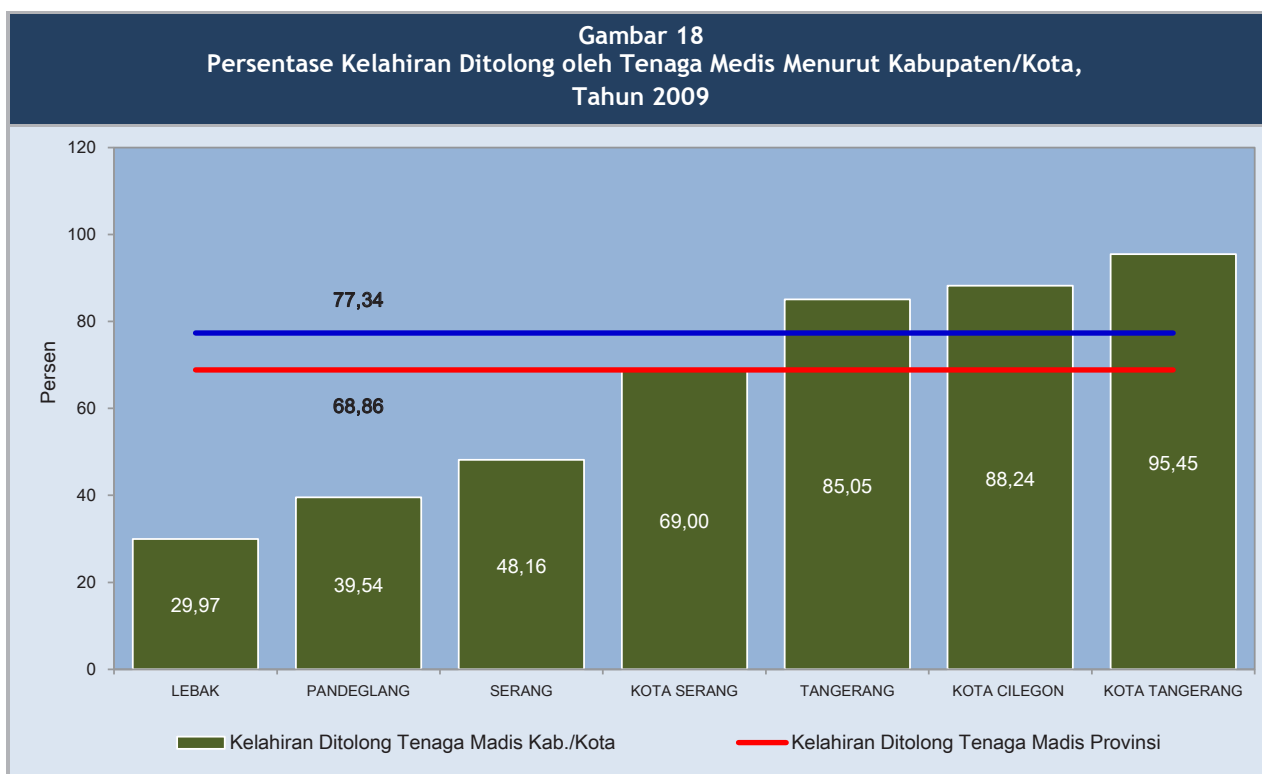
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



## BIDANG KESEHATAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

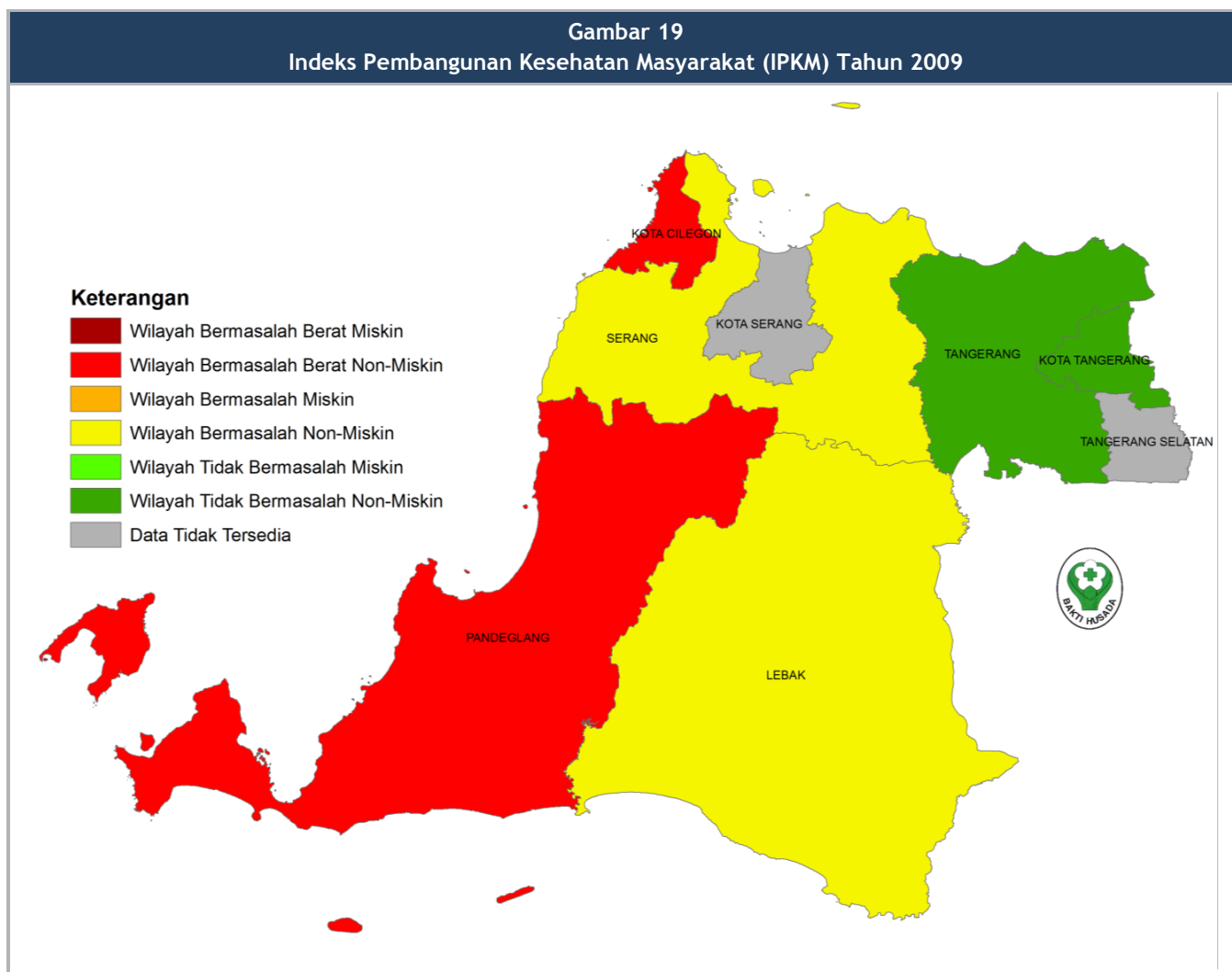
## BIDANG KESEHATAN

Tabel 6.  
Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Penduduk dengan keluhan kesehatan	Angka Morbiditas	Rata-rata Lama Sakit	Penduduk yg Melakukan Pengobatan Sendiri
	(%)	(%)	(%)	(%)
PANDEGLANG	38,74	22,72	6,86	81,21
LEBAK	31,02	17,20	5,90	85,10
TANGERANG	40,44	20,57	4,23	69,08
SERANG	32,82	15,88	5,71	79,99
KOTA TANGERANG	40,64	16,31	4,68	67,30
KOTA CILEGON	32,24	22,35	3,52	77,30
KOTA SERANG	40,38	29,12	4,48	93,21
BANTEN	37,73	19,55	4,98	74,74
INDONESIA	33,68	18,63	5,51	68,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

# INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

## INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

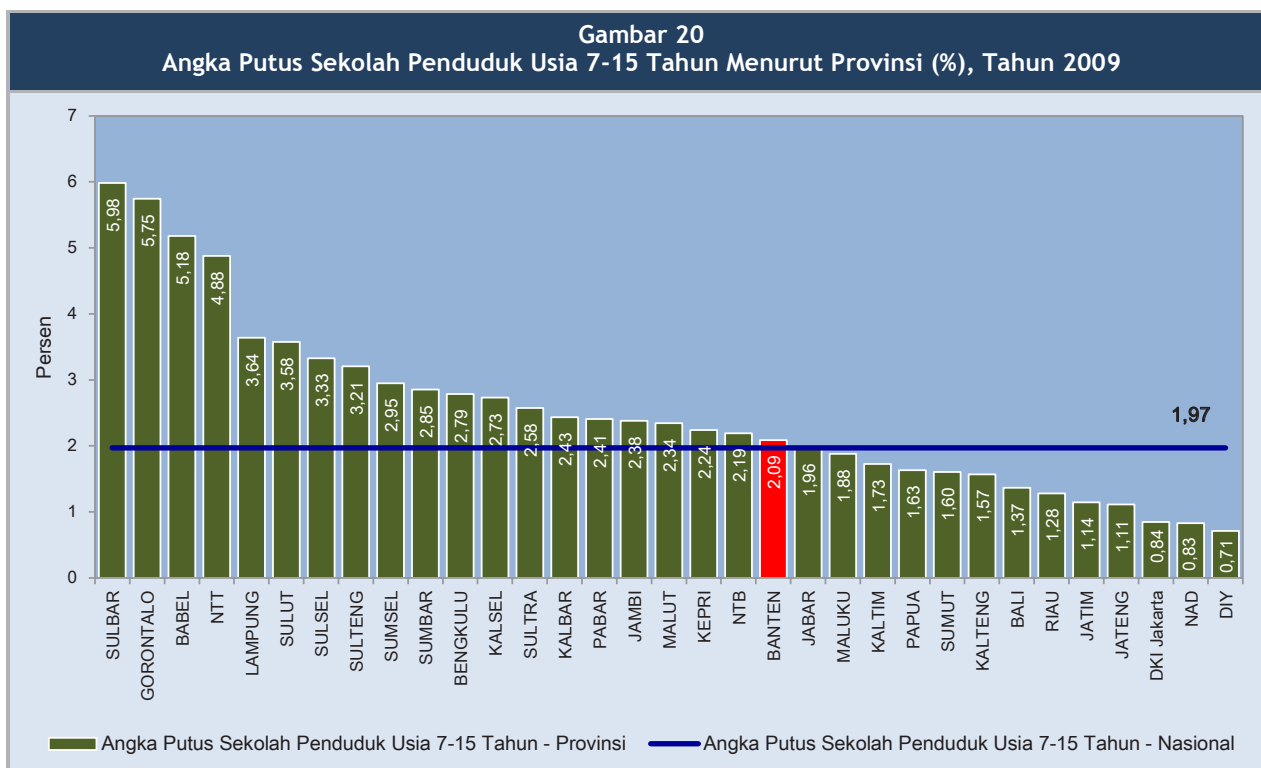
Tabel 7.  
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)<sup>2</sup> Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Kategori Wilayah	IPKM		Keterangan
		Rangking	Nilai	
PANDEGLANG	KaB	420	0,36	Kabupaten Bermasalah Berat Non Miskin
LEBAK	KaD	373	0,41	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
TANGERANG	KaF	141	0,56	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
SERANG	KaD	345	0,44	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
KOTA TANGERANG	KoF	54	0,62	Kota Tidak Bermasalah Non Miskin
KOTA CILEGON	KoB	179	0,53	Kota Bermasalah Berat Non Miskin

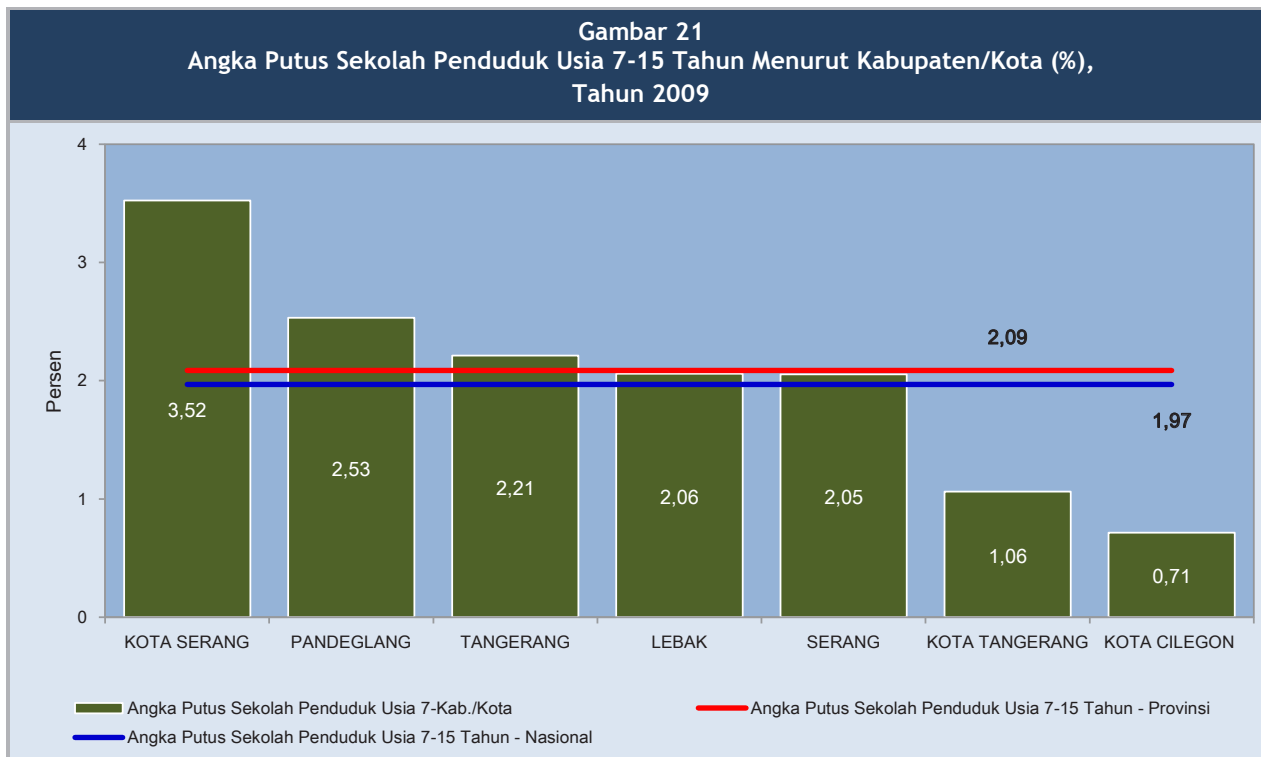
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

<sup>2</sup> IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan dan dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar); Susenas (Survei Ekonomi Nasional); dan Survei Podes (Potensi Desa). IPKM digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan pada bidang kesehatan dan mendukung efektivitas intervensi pada bidang kesehatan.

## BIDANG PENDIDIKAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

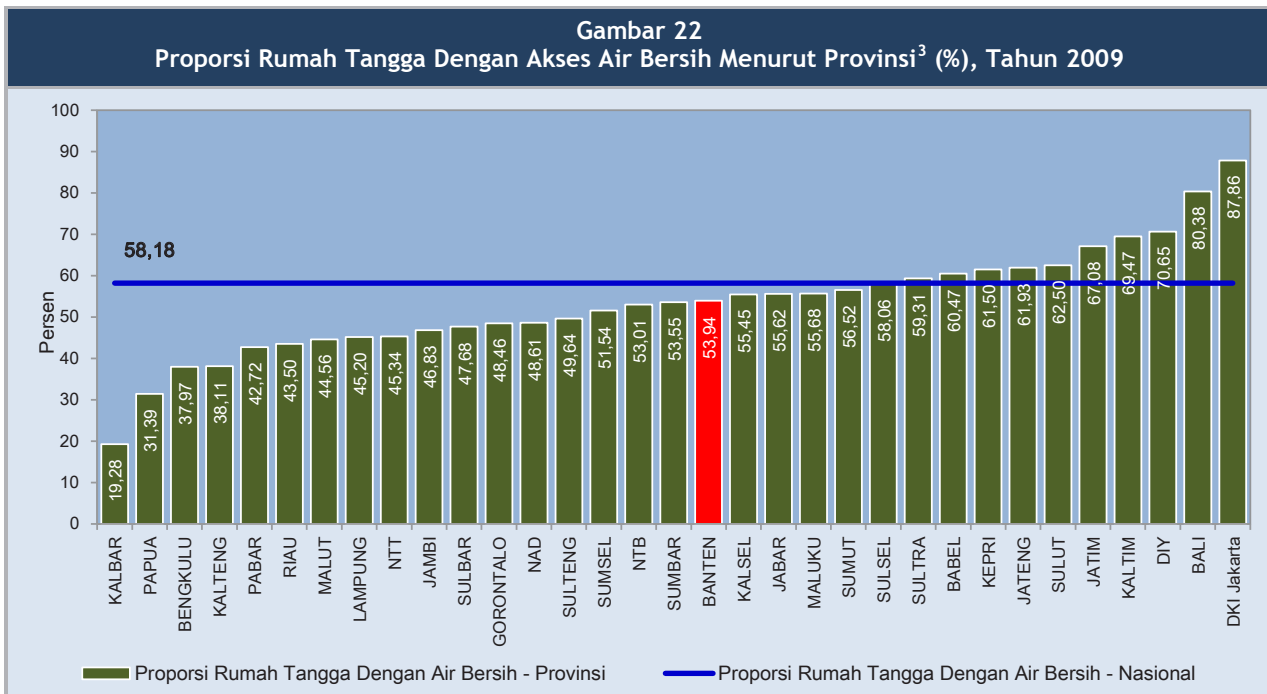
## BIDANG PENDIDIKAN

Tabel 8.  
Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

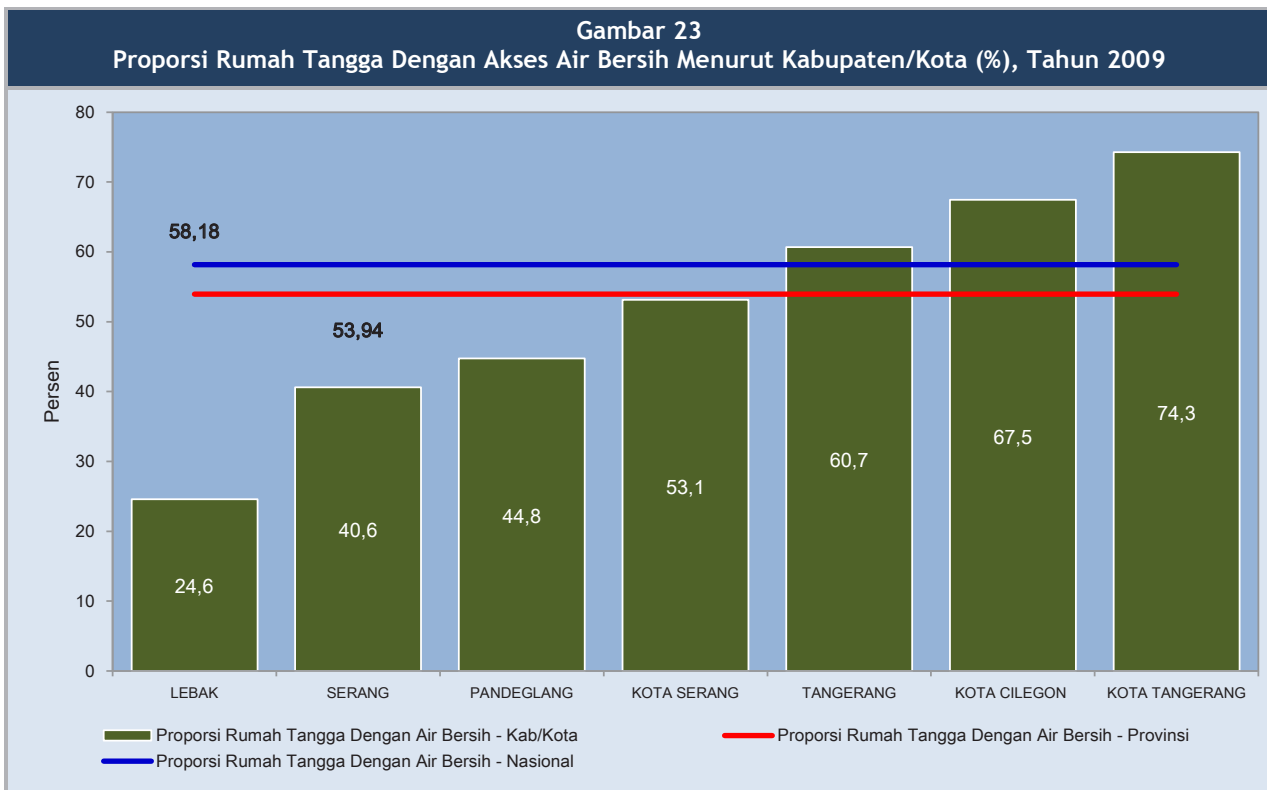
Daerah	Angka Partisipasi Pendidikan					
	Sekolah Dasar (SD/MI)		Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)		Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
PANDEGLANG	106,19	91,55	77,57	59,68	46,42	32,11
LEBAK	113,15	97,90	65,88	61,12	28,63	21,36
TANGERANG	119,50	96,21	56,52	49,56	67,16	39,59
SERANG	109,27	95,59	89,55	75,40	51,31	44,10
KOTA TANGERANG	107,50	86,25	91,39	62,91	71,51	47,10
KOTA CILEGON	101,12	90,30	99,30	73,46	72,33	55,39
KOTA SERANG	101,68	91,49	77,81	60,04	57,78	39,87
BANTEN	112,21	94,07	72,67	59,69	57,66	38,77
INDONESIA	110,42	94,37	81,25	67,43	62,55	45,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

# AKSES TERHADAP AIR BERSIH



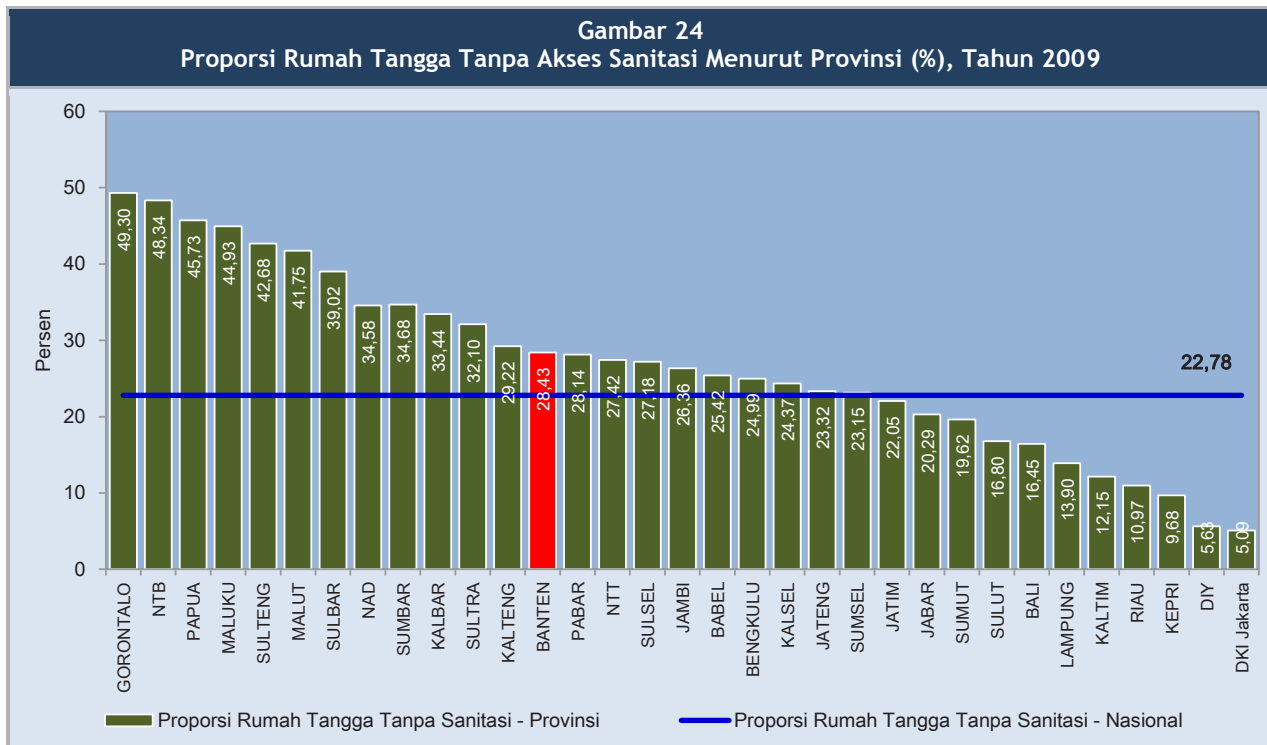
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



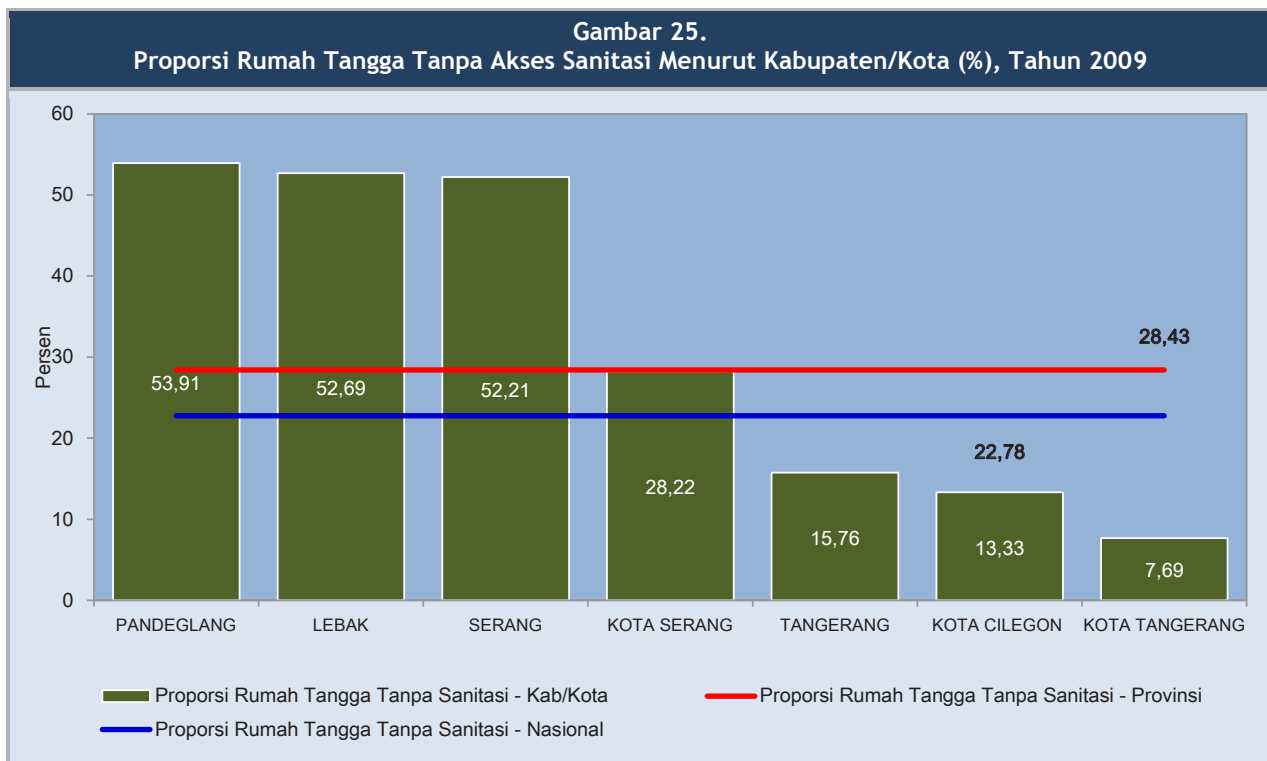
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

<sup>3</sup> Akses terhadap air bersih dengan kontrol jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat

# AKSES TERHADAP SANITASI



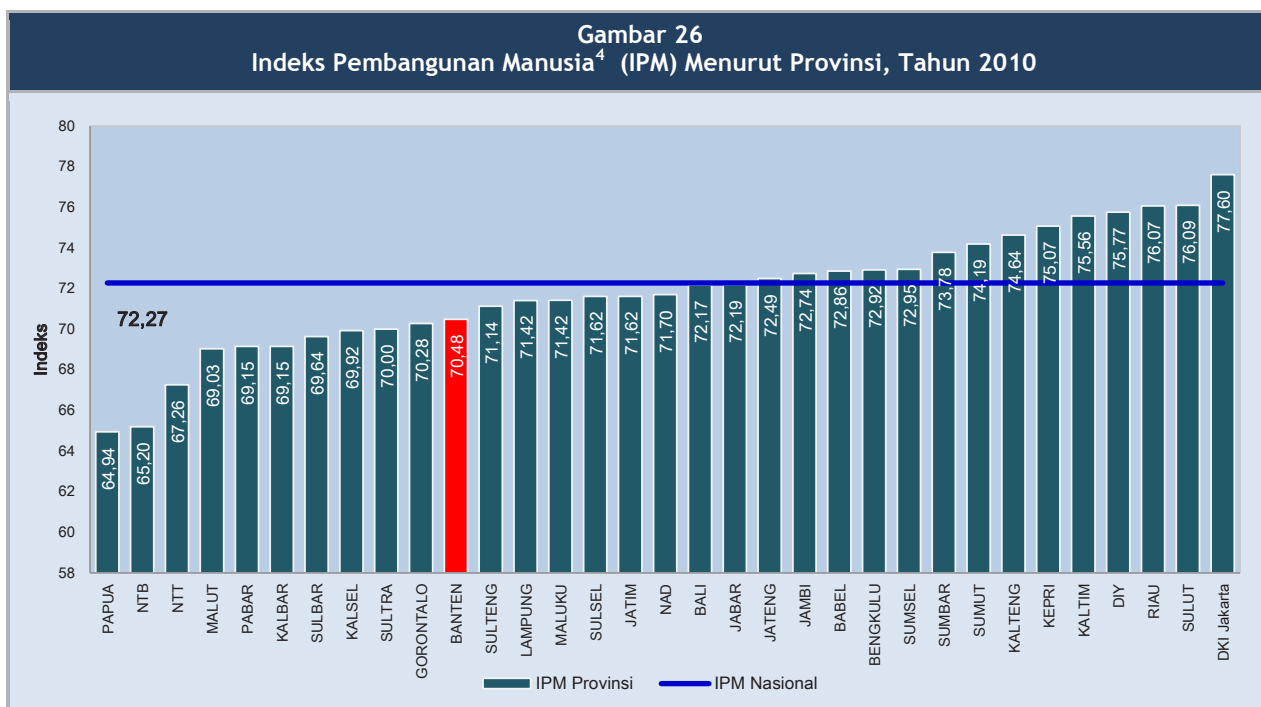
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



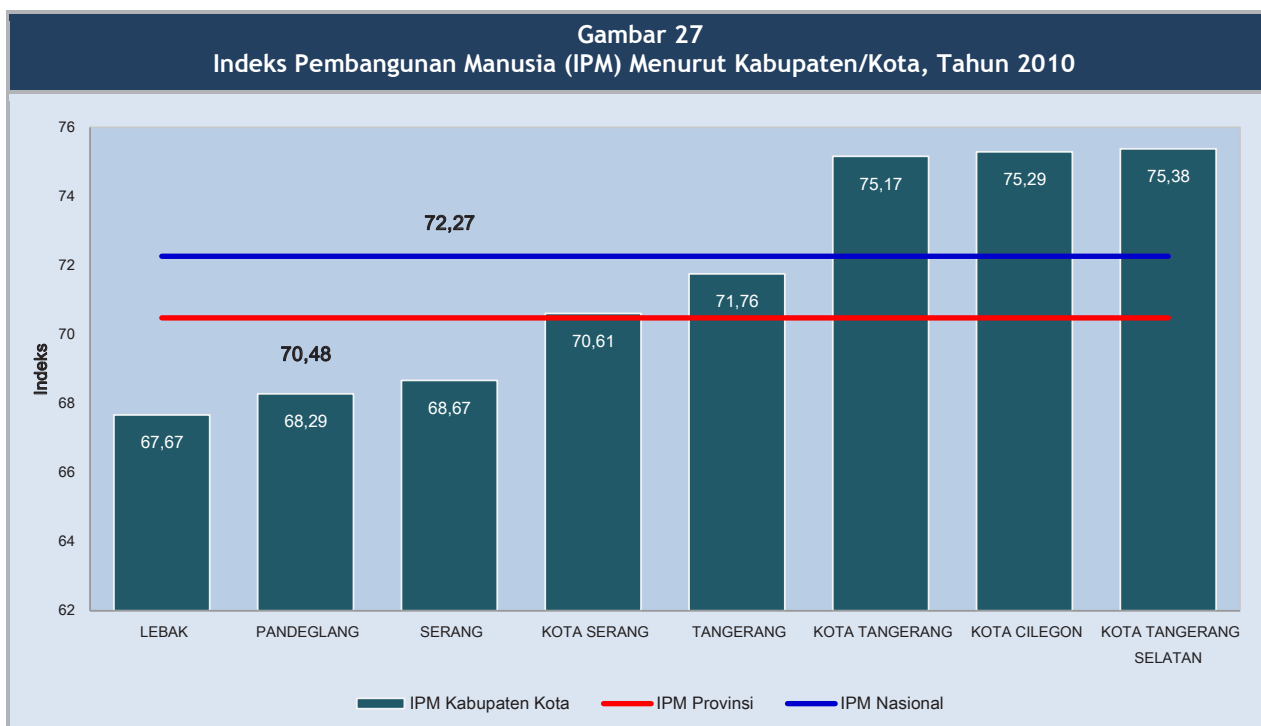
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

<sup>4</sup> Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran kesejahteraan dengan membandingkan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Ukuran kesejahteraan tersebut diperkenalkan dan diterbitkan oleh PBB dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) sejak tahun 1990.

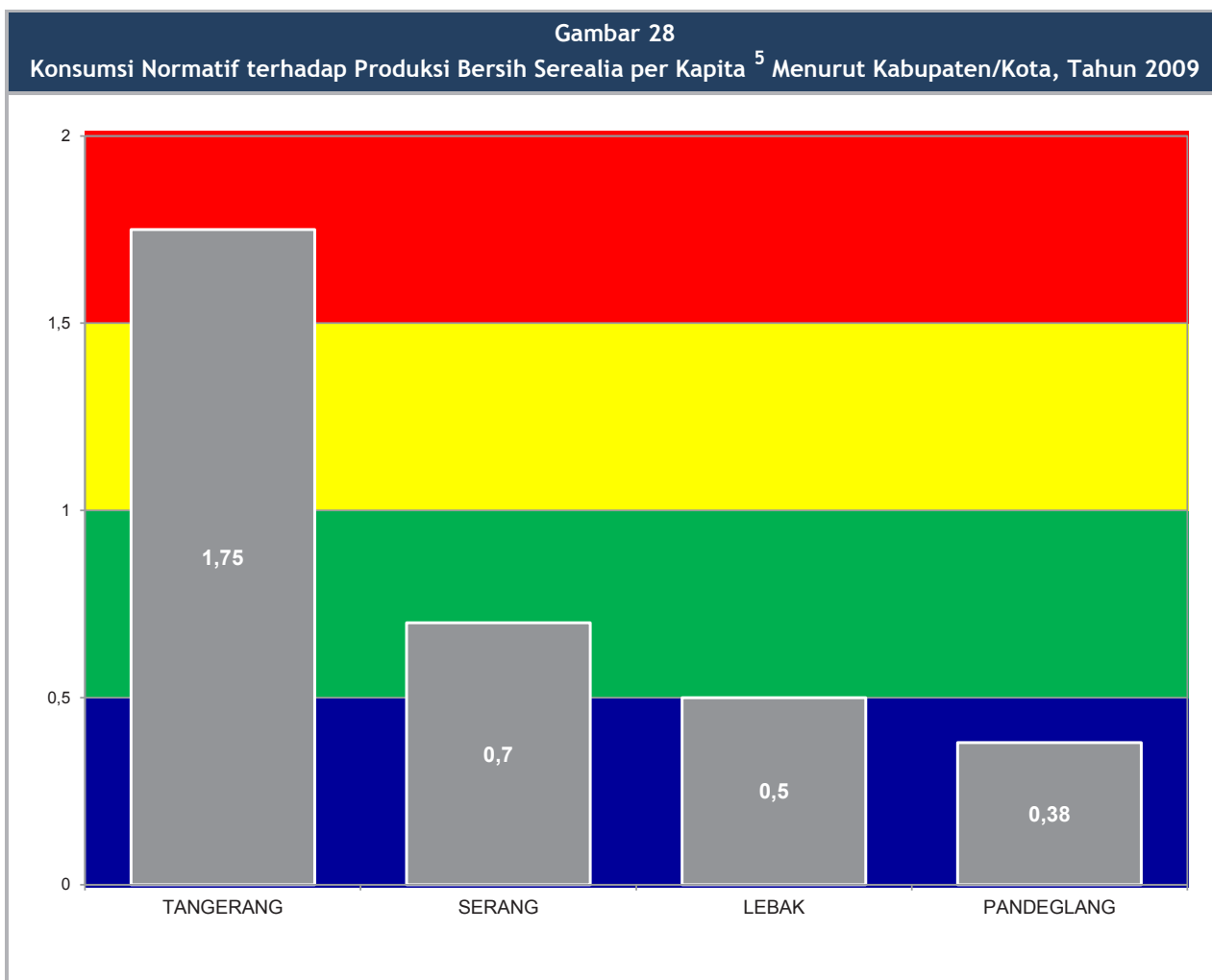
## KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 9.  
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota,  
Tahun 2009 dan 2010

Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		IPM	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)		2009	2010
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010		
PANDEGLANG	63,52	63,77	96,30	96,35	6,44	6,47	625,06	626,73	67,99	68,29
LEBAK	63,21	63,28	94,55	94,60	6,22	6,24	627,49	629,44	67,45	67,67
TANGERANG	65,61	65,79	95,66	95,78	8,93	8,94	632,77	635,19	71,45	71,76
SERANG	63,08	63,51	94,93	95,23	7,04	7,05	630,08	631,19	68,27	68,67
KOTA TANGERANG	68,33	68,37	98,35	98,39	9,95	9,98	640,27	643,18	74,89	75,17
KOTA CILEGON	68,53	68,58	98,71	98,72	9,66	9,67	641,88	645,43	74,99	75,29
KOTA SERANG	64,62	65,13	96,27	96,47	7,25	7,51	635,34	636,77	69,99	70,61
KOTA TANGERANG SELATAN	68,43	68,54	98,14	98,15	9,95	10,15	641,72	643,75	75,01	75,38
<b>BANTEN</b>	<b>64,75</b>	<b>64,90</b>	<b>95,95</b>	<b>96,20</b>	<b>8,15</b>	<b>8,32</b>	<b>627,63</b>	<b>629,70</b>	<b>70,06</b>	<b>70,48</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>69,21</b>	<b>69,43</b>	<b>92,58</b>	<b>92,91</b>	<b>7,72</b>	<b>7,92</b>	<b>631,46</b>	<b>633,64</b>	<b>71,76</b>	<b>72,27</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

## KETAHANAN PANGAN



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, 2009 dan Banten Dalam Angka (BPS), 2010.

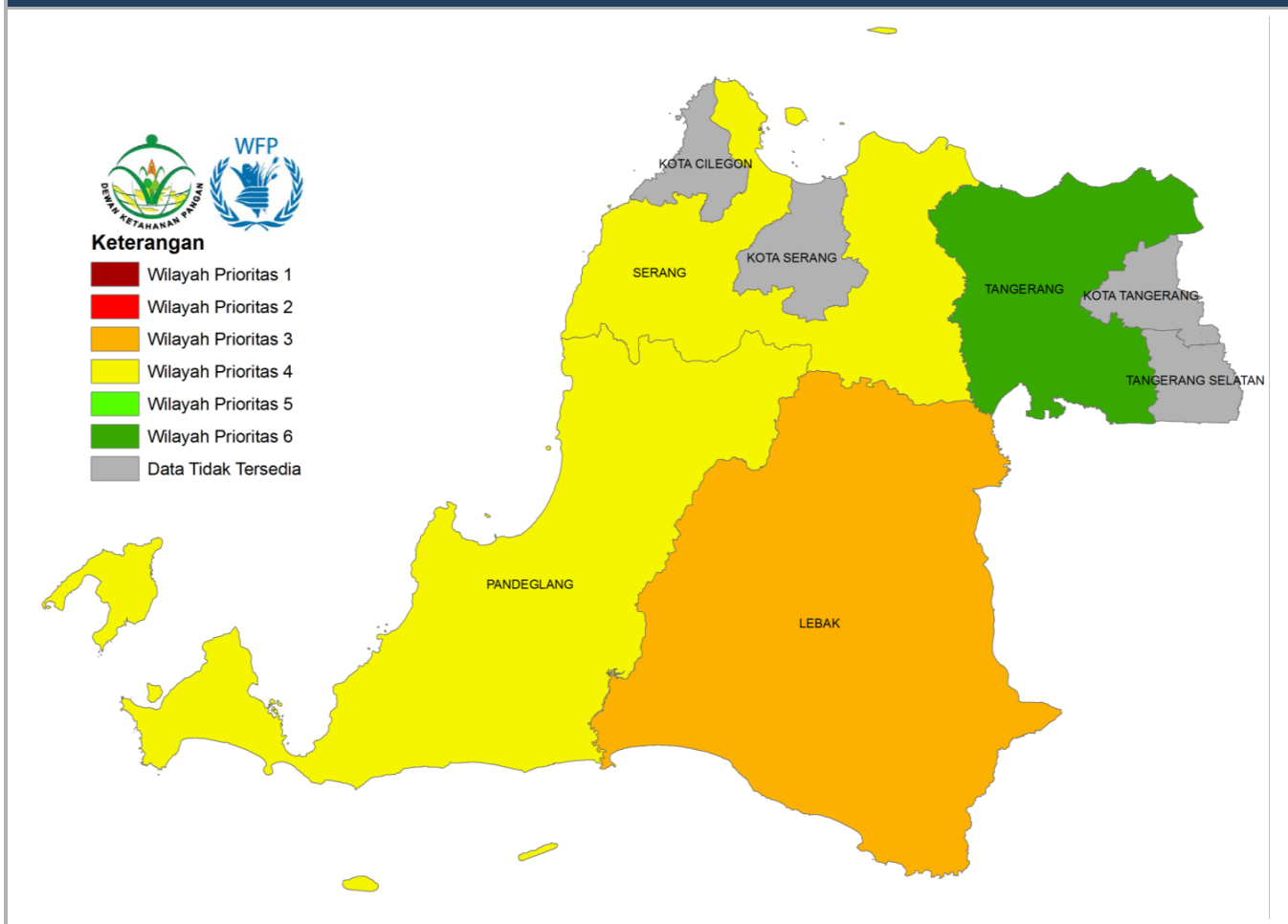
**Keterangan:**

- >1,5 Defisit Tinggi
- 1 – 1,5 Defisit Sedang
- 0,5 – 1 Surplus Rendah
- 0 – 0,5 Surplus Tinggi
- 0 Data Tidak Tersedia

<sup>5</sup> Merupakan salah satu ukuran ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan Kota dan termasuk dalam Peta Kerawanan Pangan Indonesia (Food Insecurity Atlas-FIA) diperkenalkan oleh DKP, Badan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) pada tahun 2005.

# KETAHANAN PANGAN

Gambar 29  
Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan<sup>6</sup> Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009



Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009

<sup>6</sup> Pada tahun 2009, cakupan diperluas dari 30 provinsi di 265 kabupaten menjadi 32 provinsi dan 346 kabupaten serta merupakan konsolidasi berbagai aspek yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan serta gizi dan kesehatan yang dipublikasikan dengan nama “Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)”

Tabel 10.  
Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Ketersediaan Pangan			Akses Pangan			Akses terhadap Kesehatan dan Gizi					Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)
	Produksi Bersih Serealia-Kab./Kota (Kg/kapita/hari)	Rasio Konsumsi Normatif-Kab./Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Non Elektrifikasi	Desa tanpa Akses ke Jalan (%)	Angka Buta Huruf Perempuan (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan (%)	Penduduk tanpa akses pada air bersih* (%)	2009	
PANDEGLANG	2009 796	2009 0,38	2009 12,01	2008 27,97	2008 0,00	2009 9,32	2009 63,52	2007 25,8	2008 17,31	2009 55,29	340,9	
LEBAK	600	0,5	10,63	25,28	0,00	6,06	63,21	17,9	20,94	75,42	316,2	
TANGERANG	171	1,75	6,55	4,99	0,00	5,70	65,61	19,0	1,52	39,34	109,9	
SERANG	428	0,7	5,80	11,92	0,65	7,07	63,08	31,4	12,34	59,39	298,6	
KOTA TANGERANG**			6,42	1,16	0,00	4,34	68,33	18,8	0,00	25,72	83,0	
KOTA CILEGON**			4,14	1,33	0,00	2,27	68,53	26,2	2,33	32,54	114,0	
KOTA SERANG**			6,19	3,95	0,00	4,01	64,62	31,4	6,06	46,87	187,7	
KOTA TANGERANG SELATAN***							68,43				54,9	

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011, Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009.

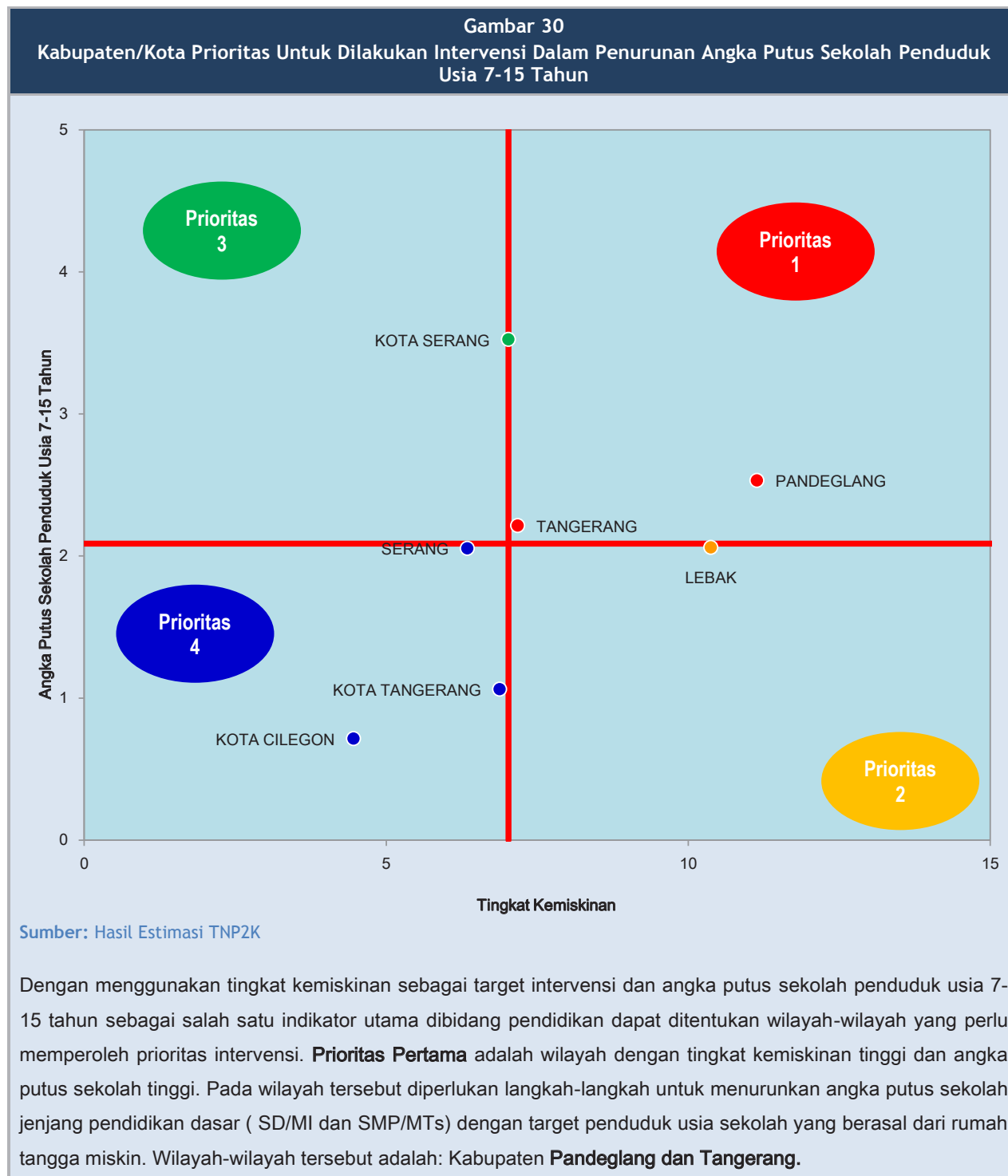
Keterangan:

\*Air Bersih dihitung dengan menggunakan kontrol jarak dari tempat pembuangan kotoran/limbah

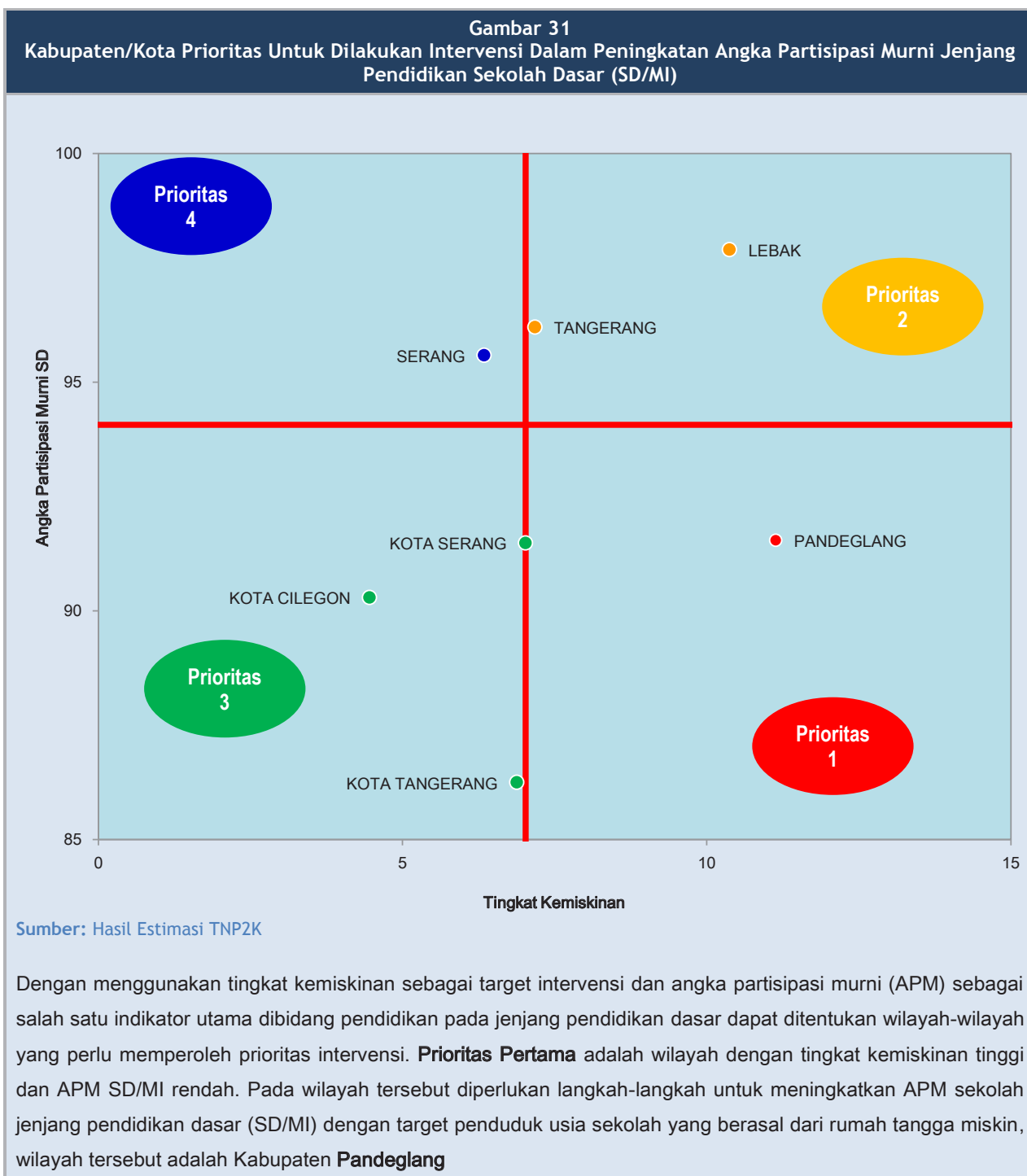
\*\* Terdapat beberapa komponen dari Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index) yang tidak terhitung karena belum terdata secara lengkap.

\*\*\* Data tidak tersedia (wilayah pemekaran).

## PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN

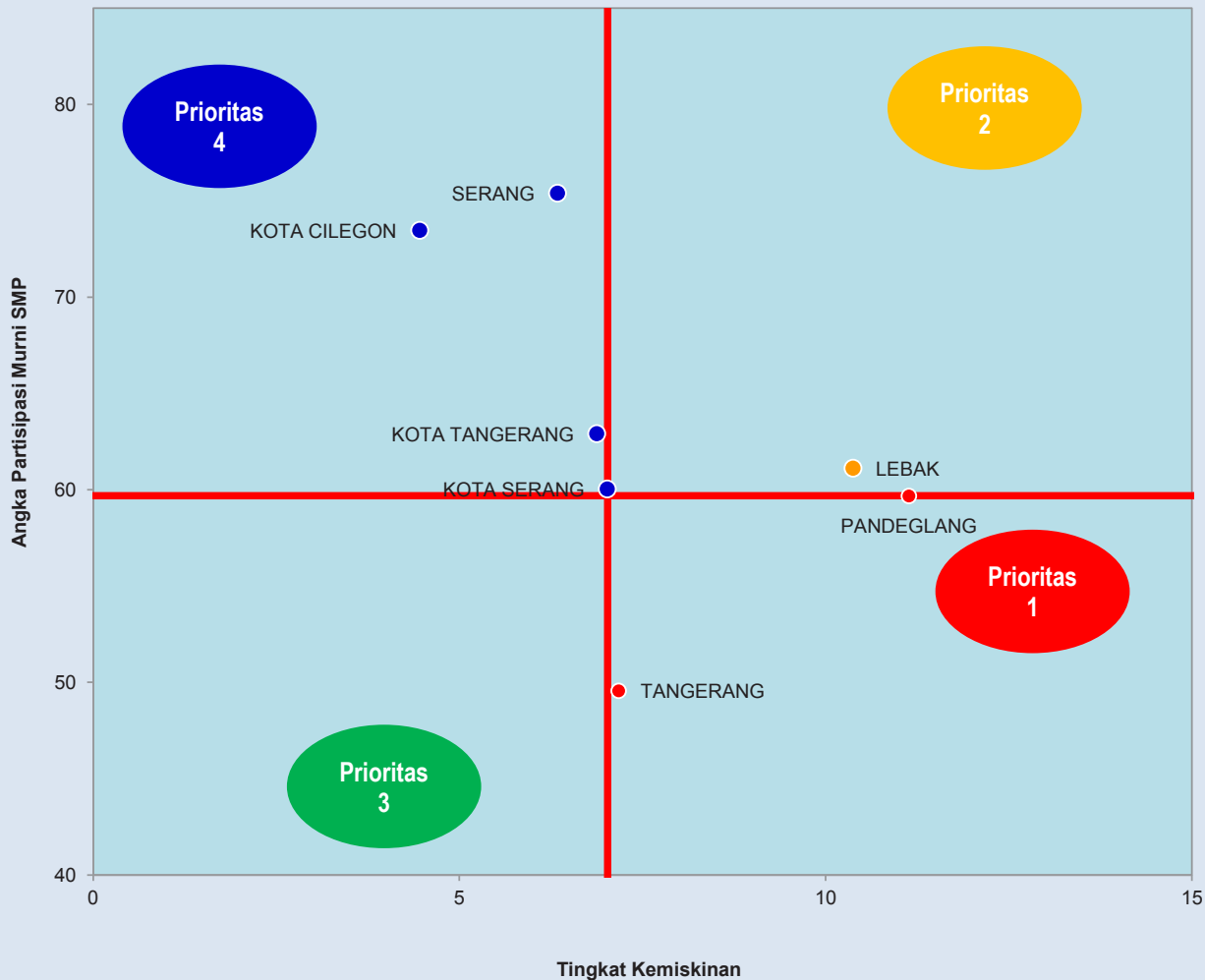


## PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN



## PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN

Gambar 32  
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama

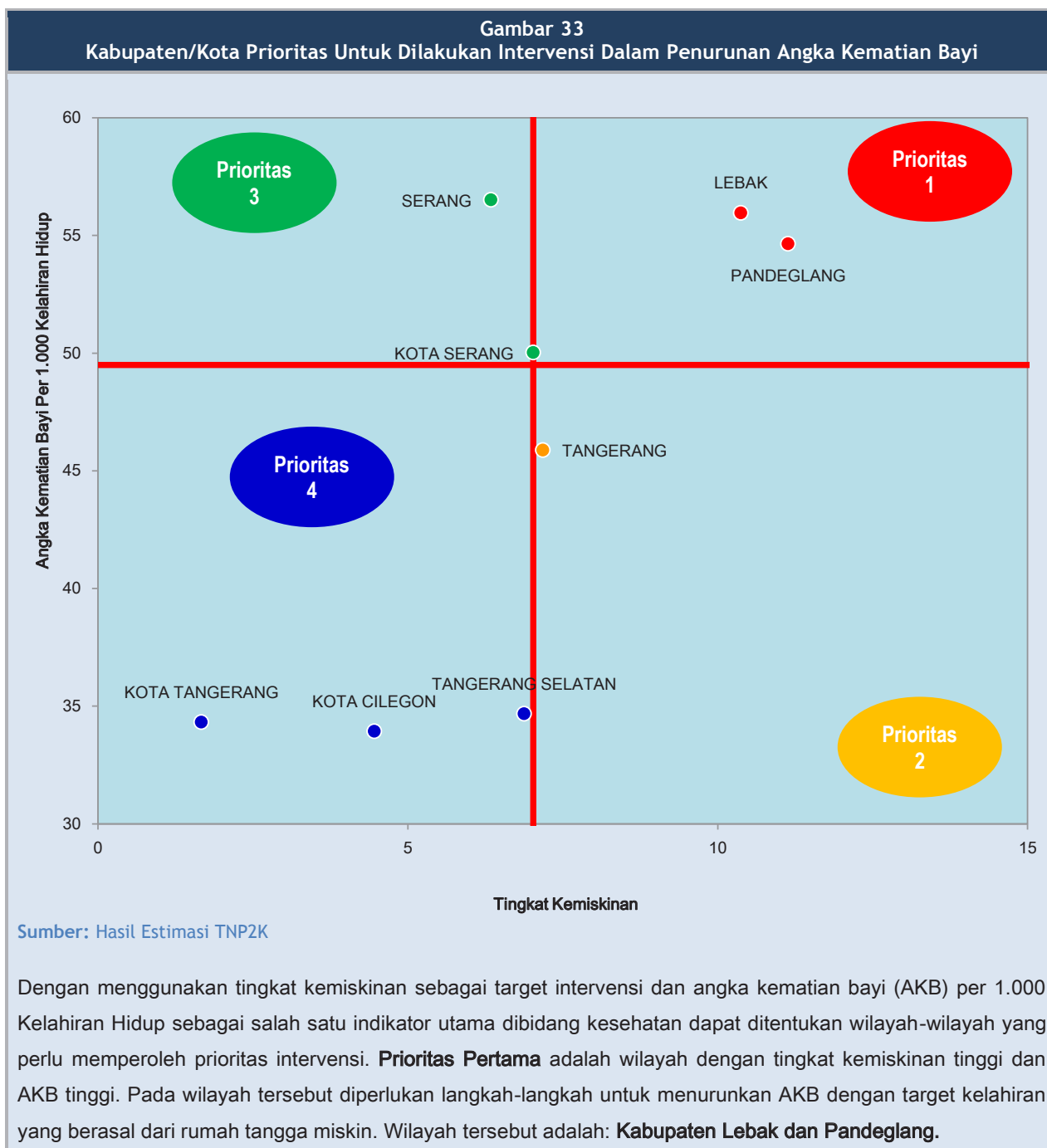


Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

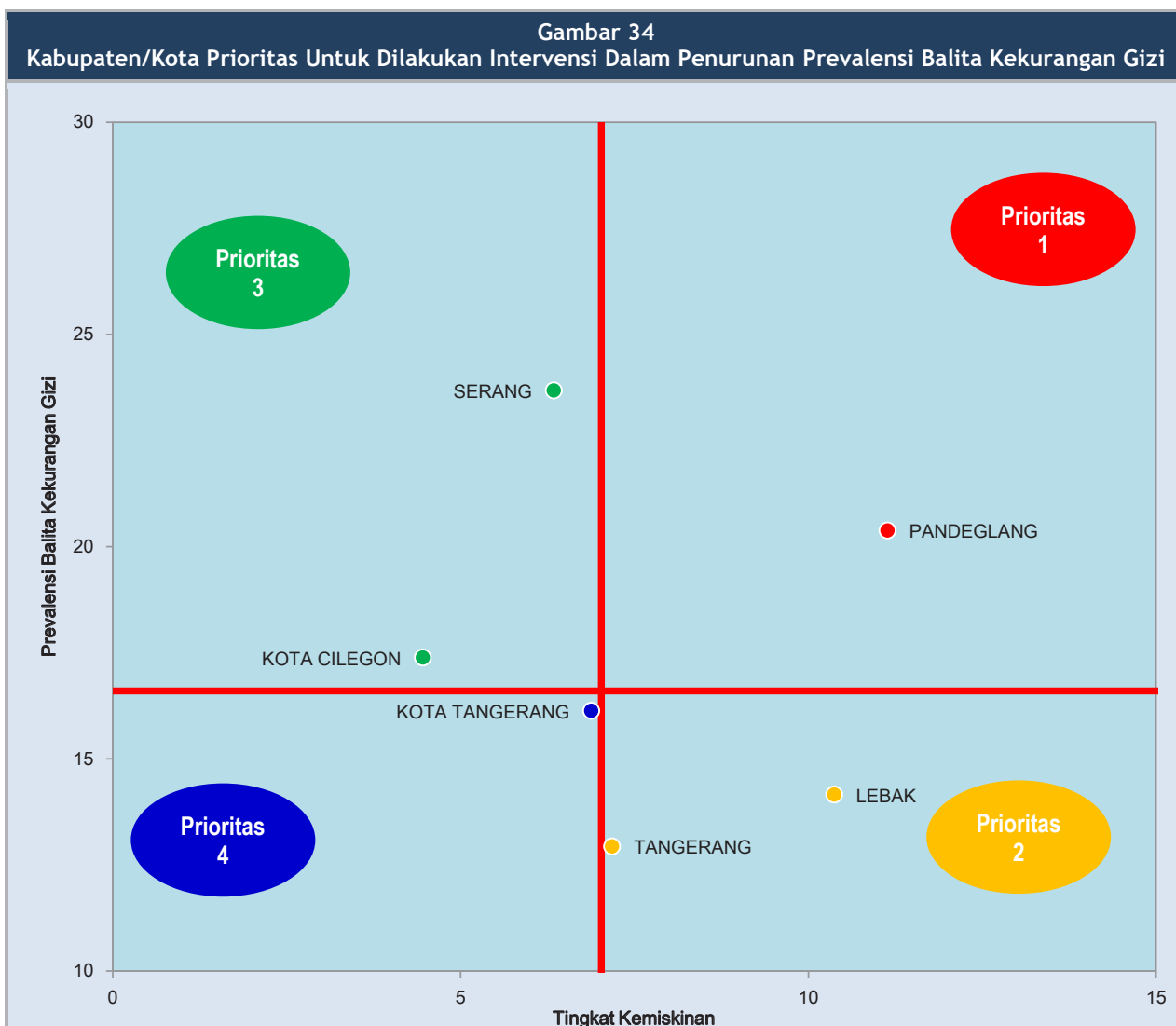
Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka partisipasi murni (APM) sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan APM SMP/MTs rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan APM sekolah jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin, wilayah tersebut adalah **Kabupaten Pandeglang dan Tangerang**.



## PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



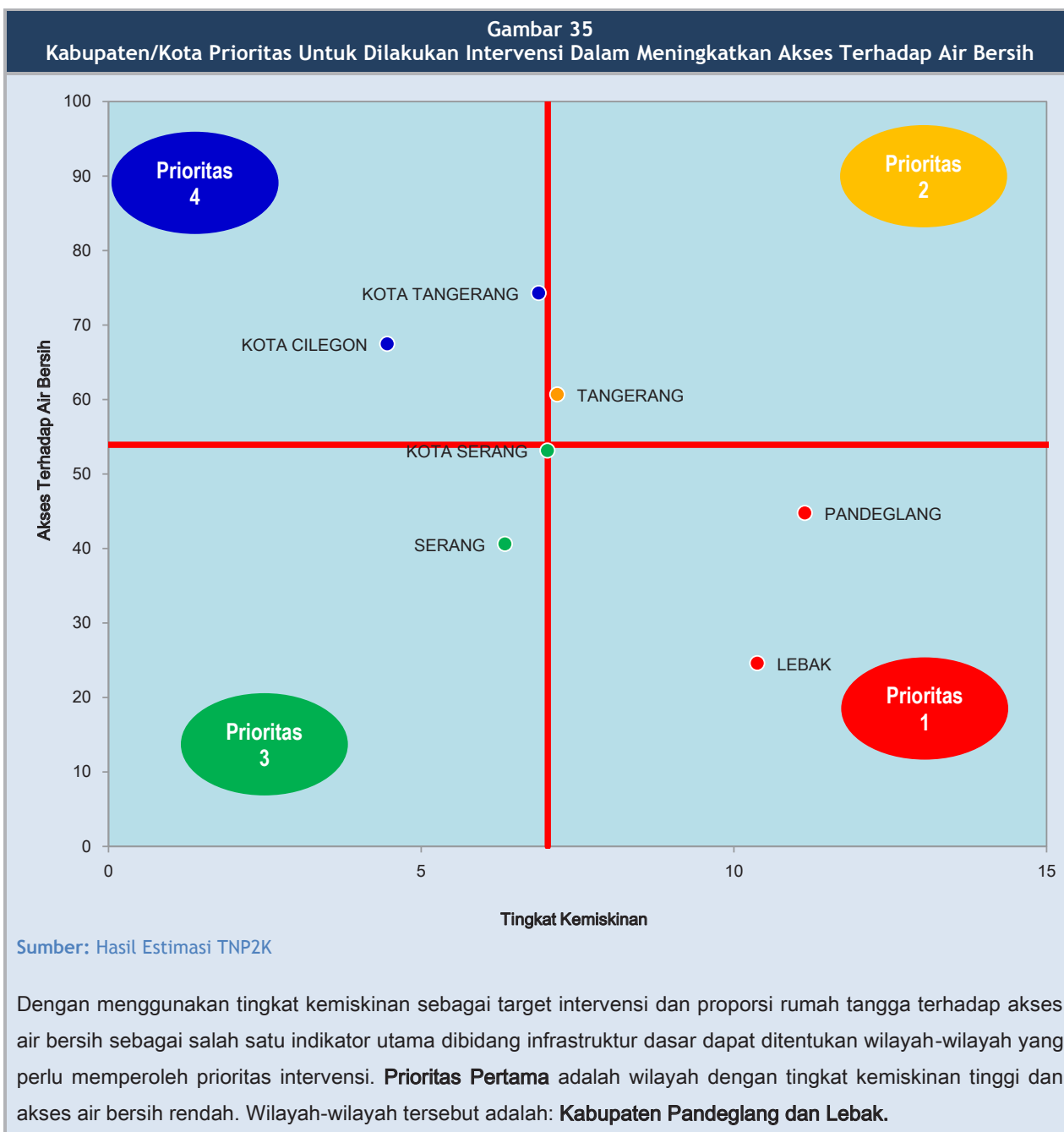
## PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



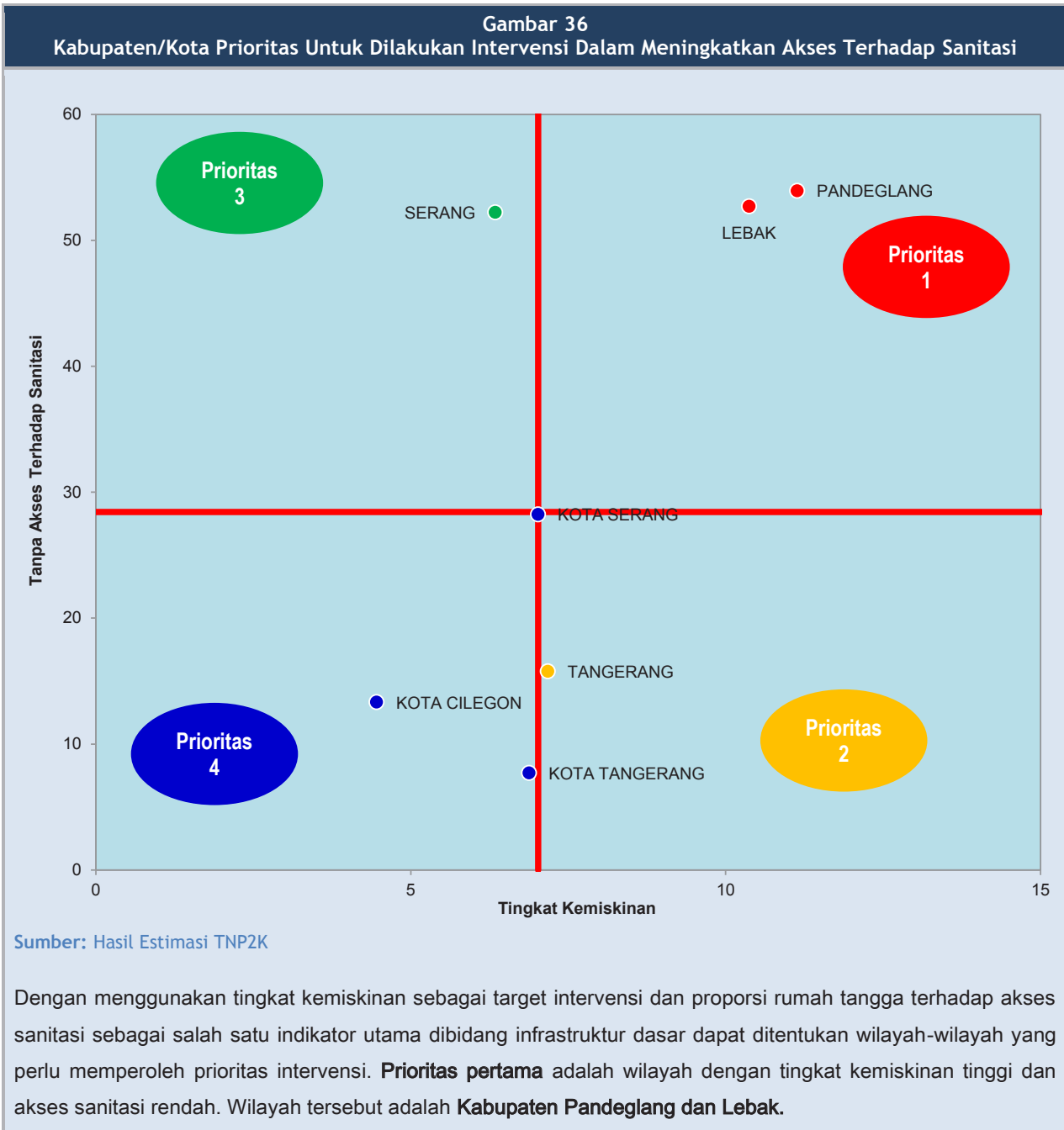
Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan prevalensi balita kekurangan gizi sebagai salah satu indikator utama dibidang kesehatan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan prevalensi balita kekurangan gizi tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan prevalensi balita kekurangan gizi dengan target balita yang berasal dari rumah tangga miskin. Wilayah-wilayah tersebut diantaranya adalah: **Kabupaten Pandeglang**.

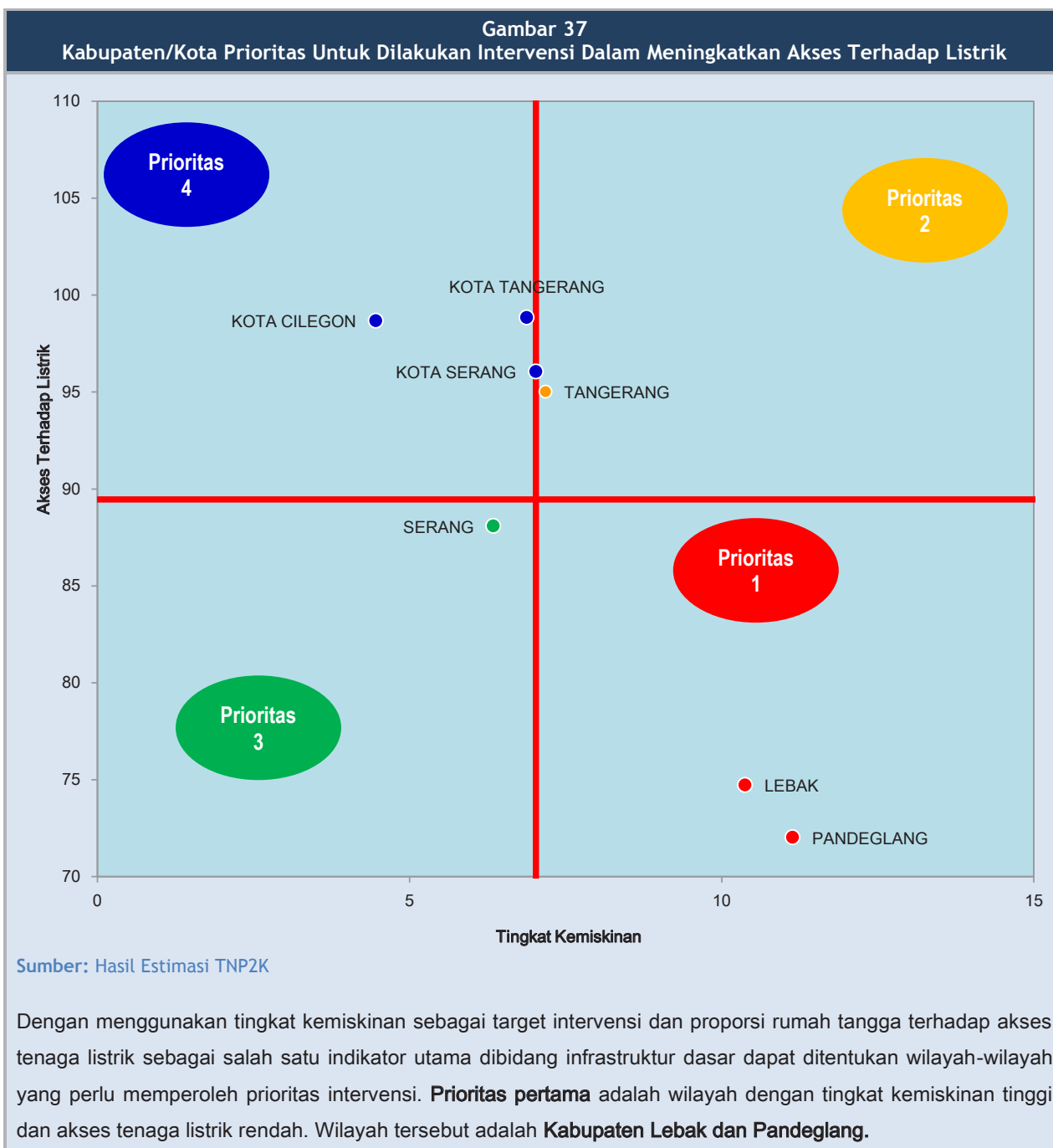
## PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



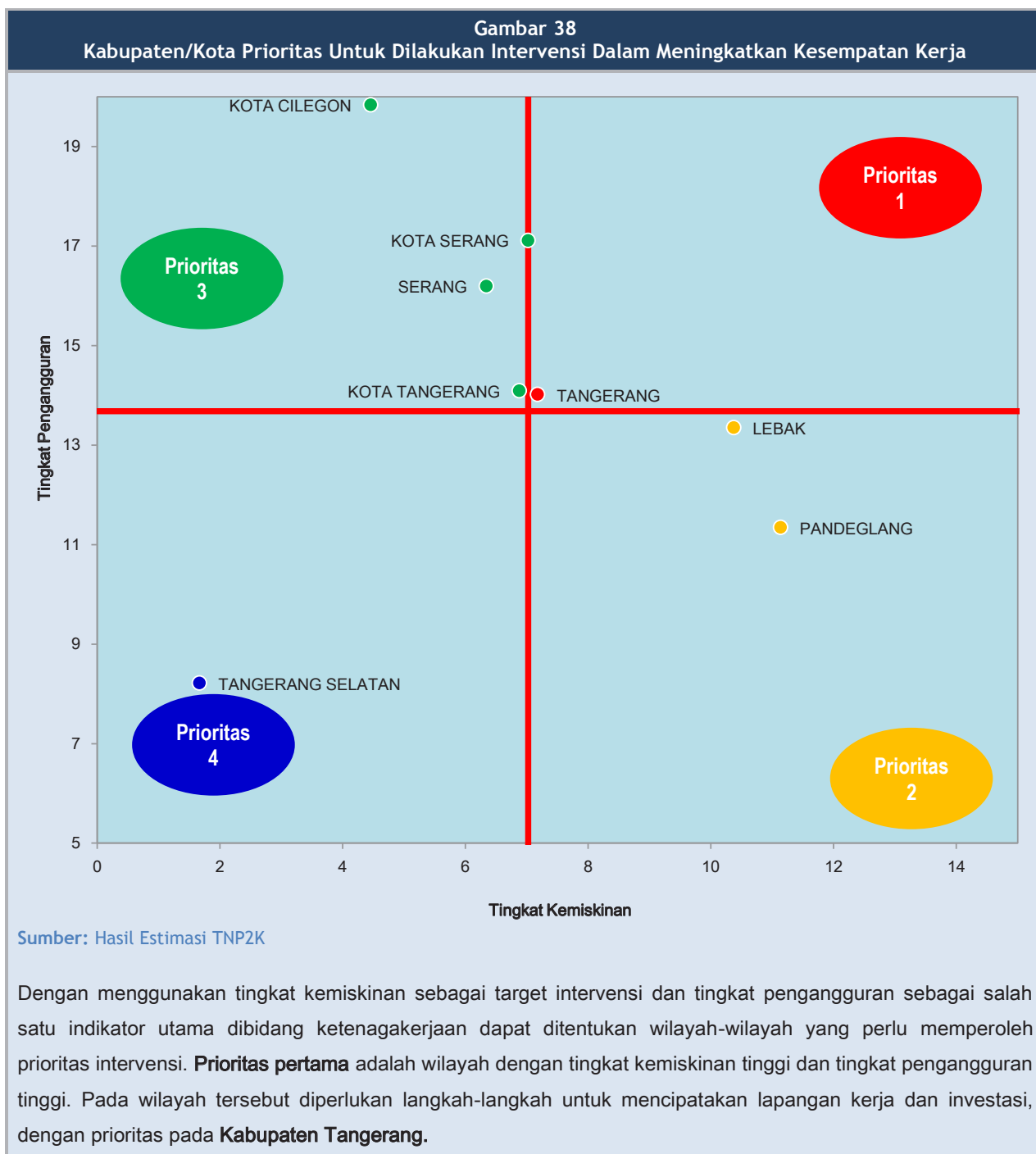
# PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



## PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



## PRIORITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN



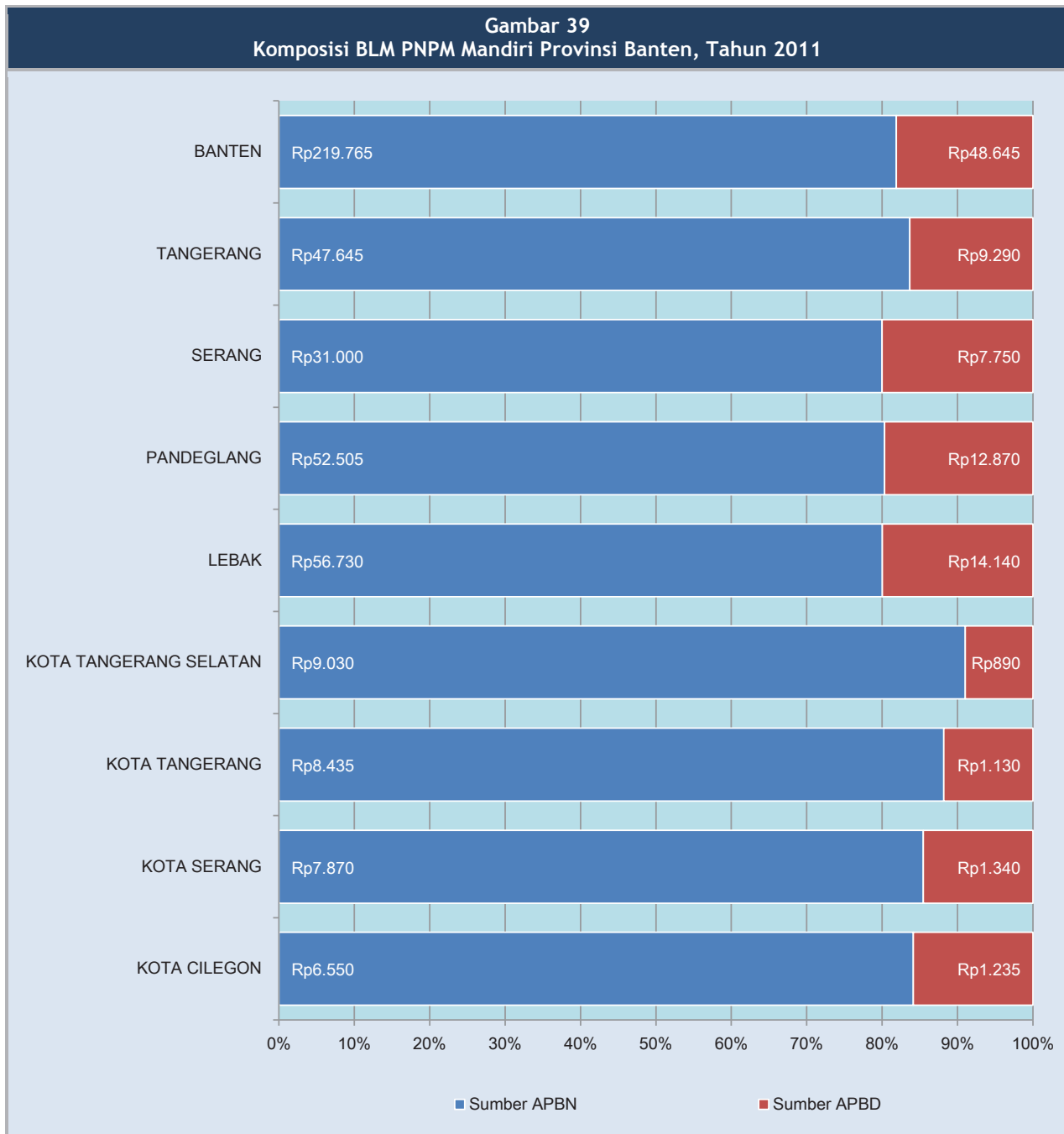
## BIDANG-BIDANG PRIORITAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tabel 11  
Rekapitulasi Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota<sup>7</sup>

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Th	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup	Prevalensi Balita Kurang Gizi	Akses Terhadap Air Bersih	Akses Terhadap Sanitasi	Akses Terhadap Listrik	Tingkat Pengang-guran
PANDEGLANG	1	1	1	1	1	1	1	1	2
LEBAK	2	2	2	1	2	1	1	1	2
TANGERANG	1	2	1	2	2	2	2	2	1
SERANG	4	4	4	3	3	3	3	3	3
KOTA SERANG	3	3	4	3		3	4	4	3
KOTA CILEGON	4	3	4	4	3	4	4	4	3
KOTA TANGERANG	4	3	4	4	4	4	4	4	3
TANGERANG SELATAN				4					4

Sumber: Rangkuman Hasil Estimasi TNP2K

<sup>7</sup> Kabupaten/Kota dalam table di atas diurutkan berdasarkan rata-rata skor nilai Prioritas 1 hingga Prioritas 4.



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

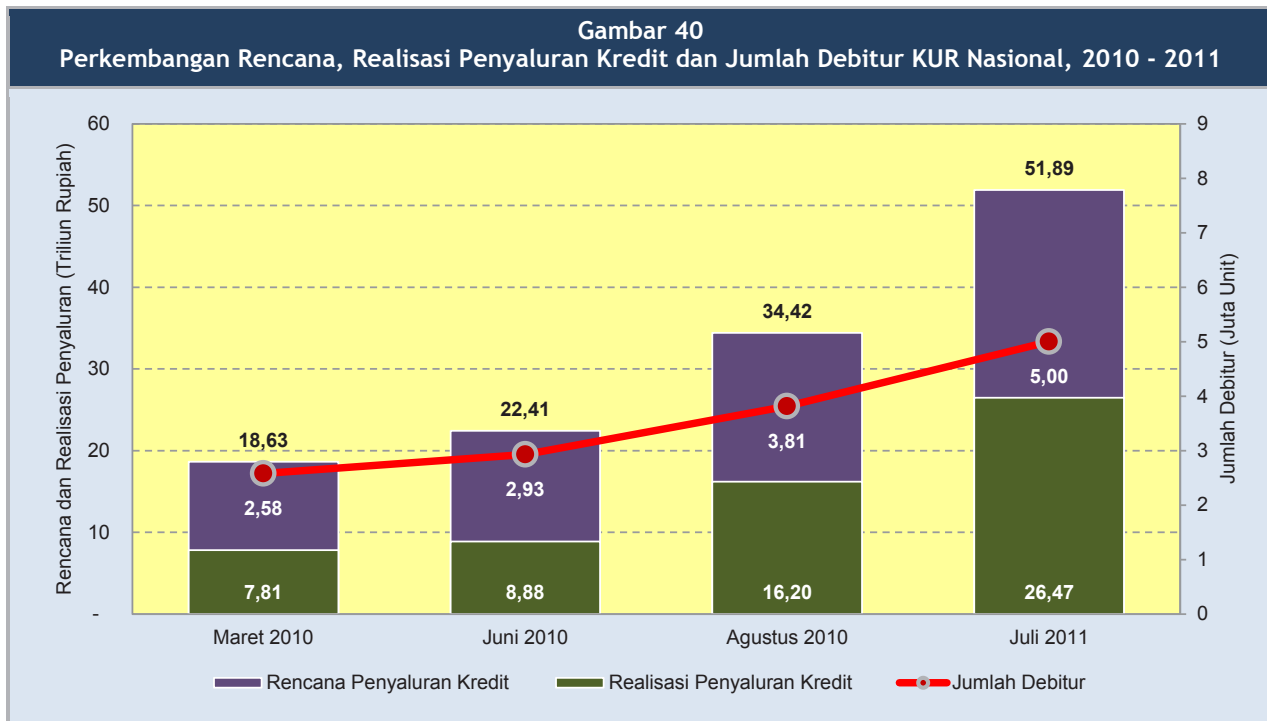


Tabel 12.  
Komposisi BLM PNPB Mandiri Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah), Tahun 2011

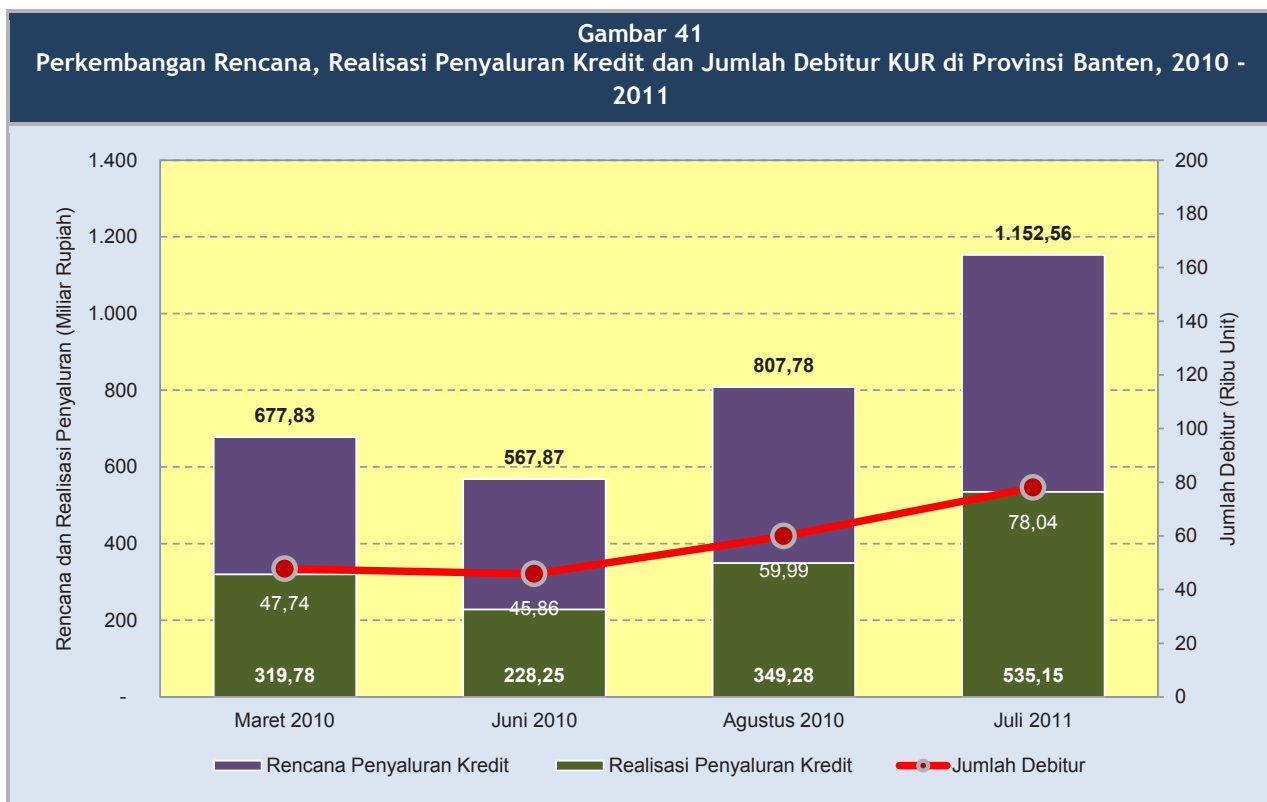
Daerah	PNPM Perdesaan	PNPM Perkotaan	Total Alokasi BLM	Sumber APBN	Sumber APBD	Jumlah Kecamatan
	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Kec.
KOTA CILEGON	-	7.785	7.785	6.550	1.235	8
KOTA SERANG	-	9.210	9.210	7.870	1.340	6
KOTA TANGERANG	-	9.565	9.565	8.435	1.130	13
KOTA TANGERANG SELATAN	4.250	5.670	9.920	9.030	890	7
LEBAK	69.000	1.870	70.870	56.730	14.140	28
PANDEGLANG	62.750	2.625	65.375	52.505	12.870	35
SERANG	38.750	-	38.750	31.000	7.750	28
TANGERANG	39.150	17.785	56.935	47.645	9.290	29
<b>BANTEN</b>	<b>213.900</b>	<b>54.510</b>	<b>268.410</b>	<b>219.765</b>	<b>48.645</b>	<b>154</b>

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

# KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

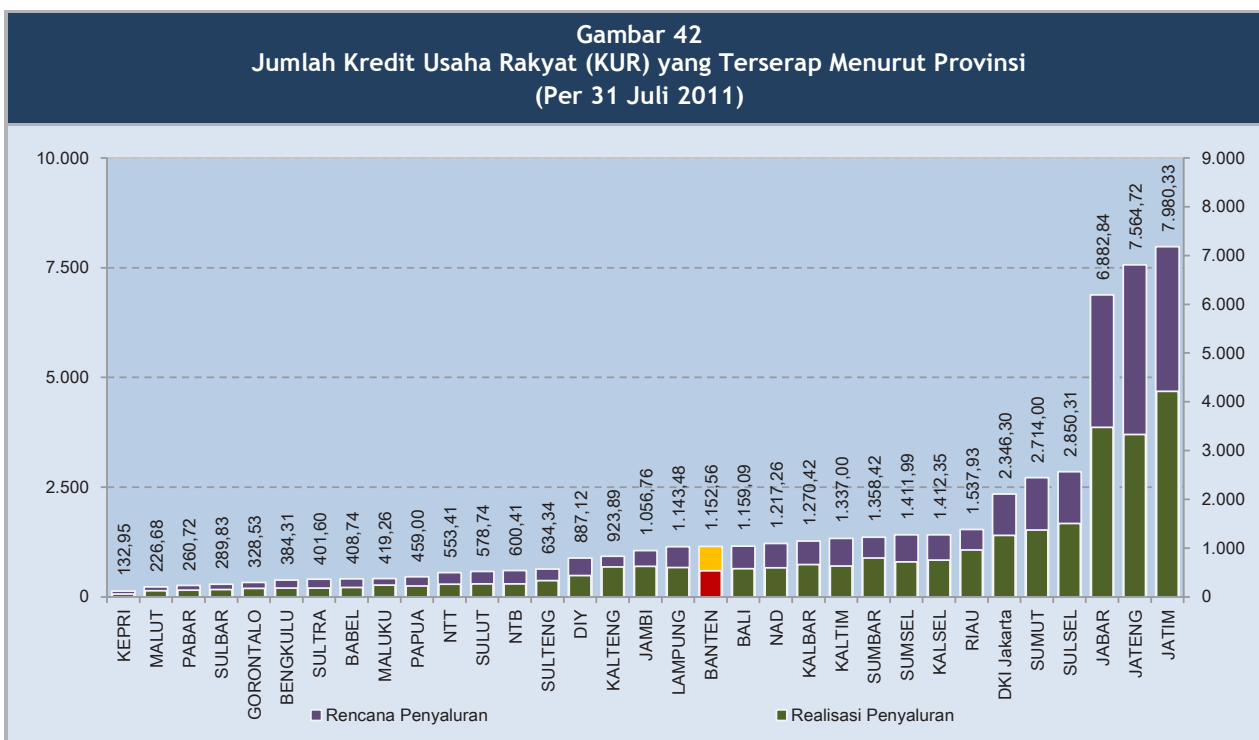


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

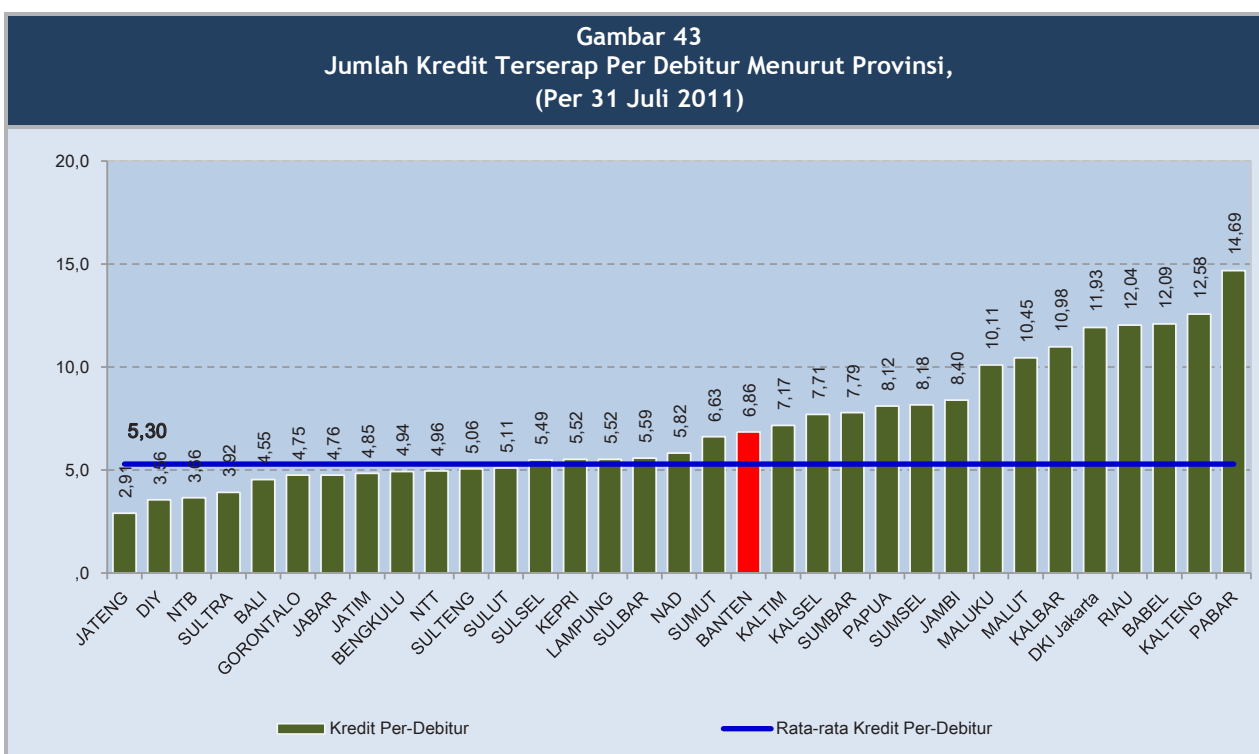


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

## KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

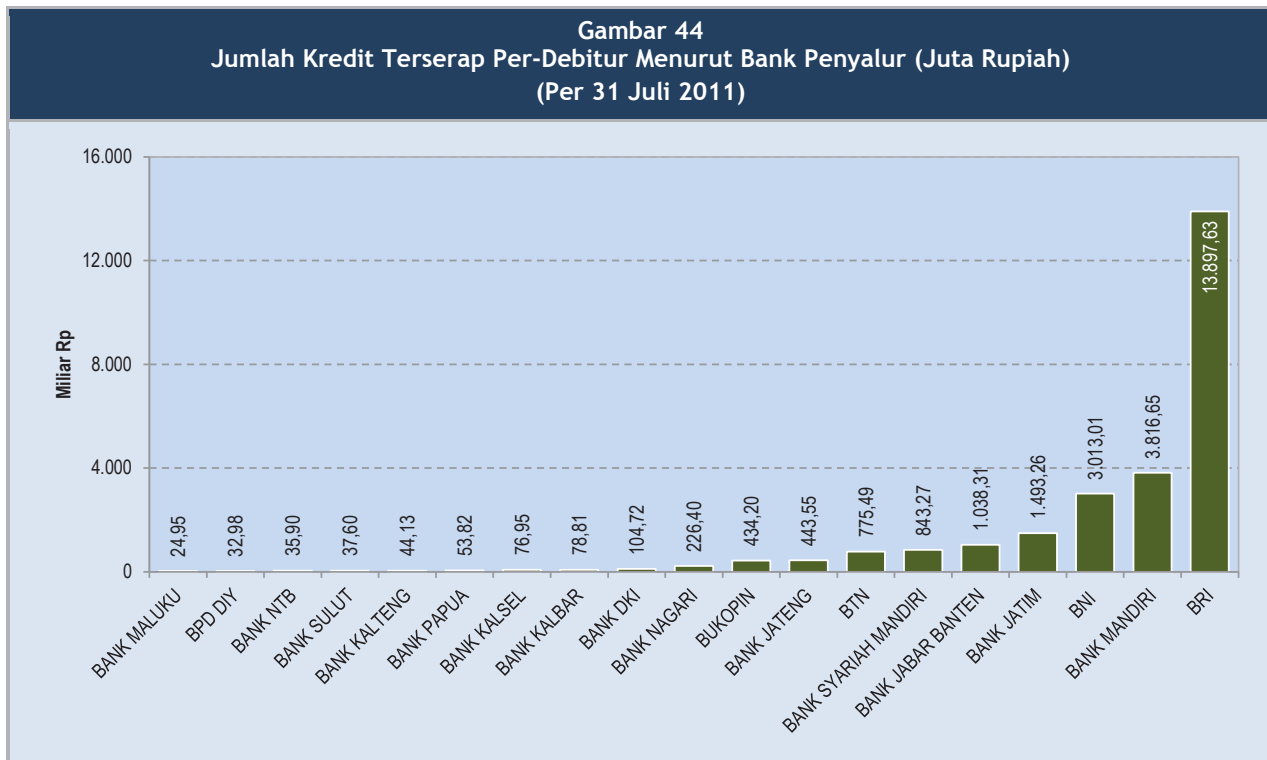


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

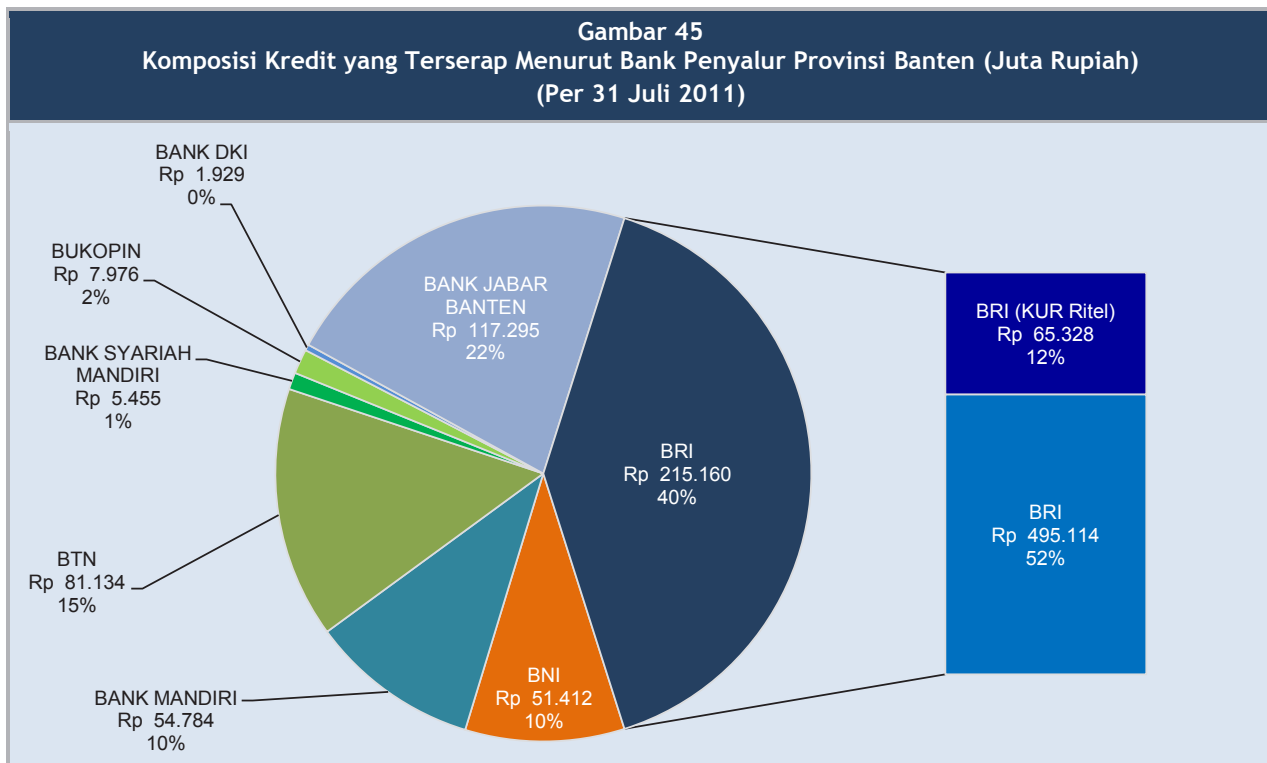


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

## KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

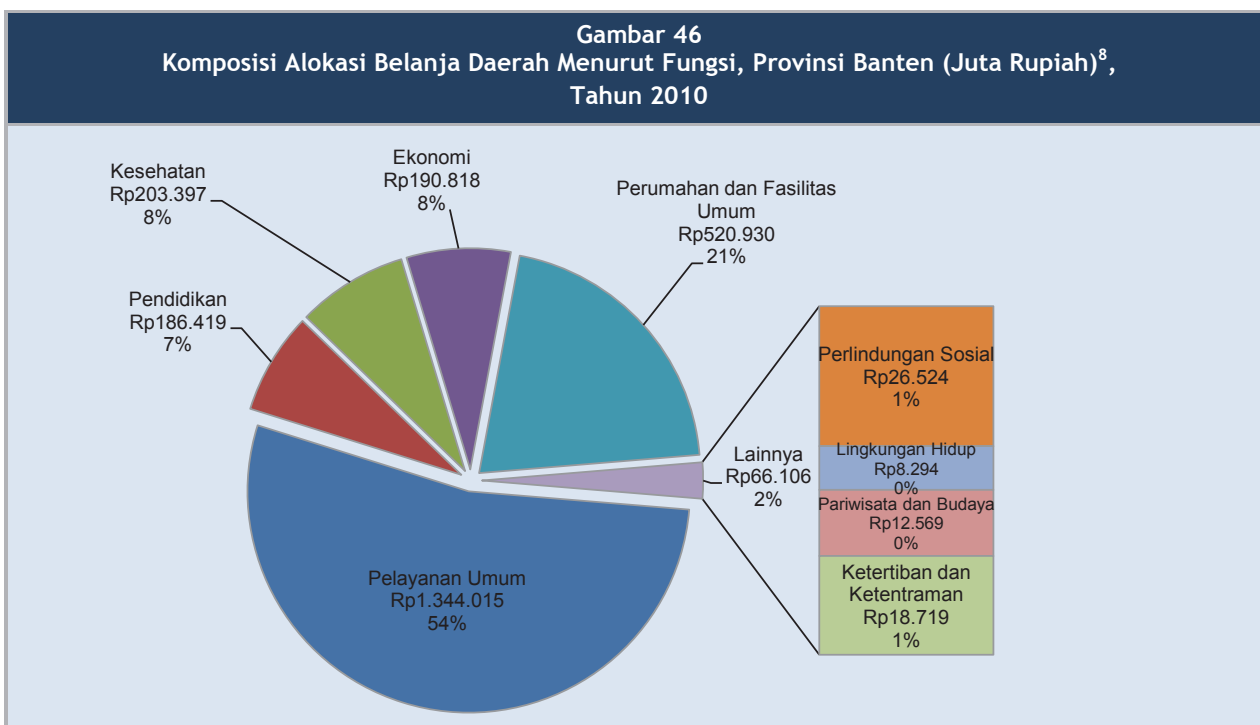


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

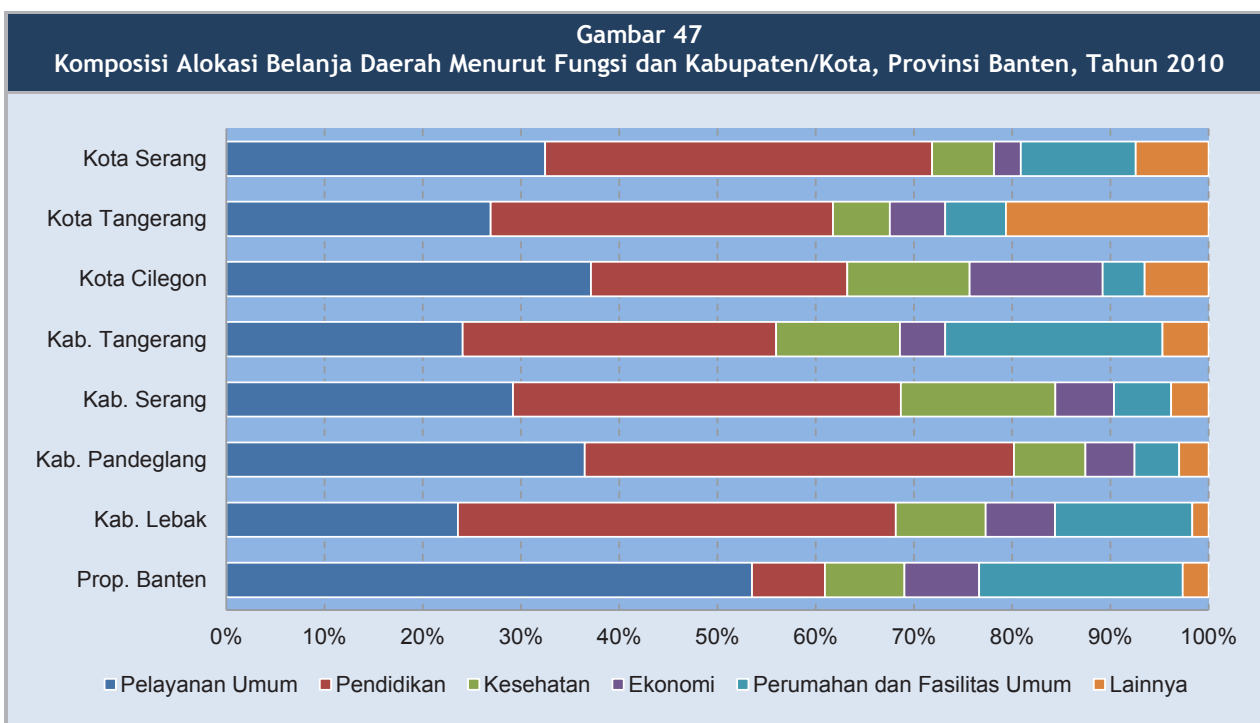


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

# ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010

<sup>8</sup> Komposisi Alokasi Belanja Daerah merupakan angka Anggaran Tahun 2010 (Bukan nilai realisasi).